



PROFIL BANGGA KENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023

**JL. N.DAULAY NO. 5, TAPANULI TENGAH,
SUMATERA UTARA 22611**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan Penyertaannya Buku Profil Kependudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 telah dapat diterbitkan. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melaporkan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian hasil pembangunan BANGGA KENCANA, termasuk kinerja dari penyelenggaraan pelayanan KB Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Profil Kependudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Data yang digunakan dalam proses penyusunan Profil ini bersumber dari berbagai unit kerja baik lintas program di lingkungan DPPKB maupun lintas sektor yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran data sehingga keluaran data tersebut menjadi valid, akurat dan relevan.

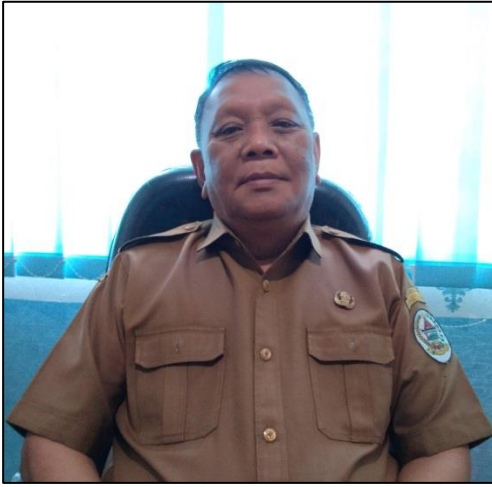
Selanjutnya diharapkan saran dan kritik yang membangun, serta partisipasi dari semua pihak khususnya dalam upaya mendapatkan data/informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Profil Kependudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terkait.

Pandan, 2023
SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULIN TENGAH

LELY ERLIANI BATUBARA, S.IP
PEMBINA
NIP.19880104 200702 2 001

SAMBUTAN



Sesuai amanat Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Badan KB mengalami pengayaan muatan program, selain menangani program Keluarga Berencana, juga program Pengendalian Penduduk. Terkait tugas fungsi tentang Pengendalian Penduduk tersebut, diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi rujukan data terutama yang berkaitan erat dengan berbagai isu kependudukan.

Buku Profil Kependudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 ini diterbitkan dengan berorientasi kepada isu yang terkait erat dengan ketiga aspek tersebut yang diuraikan tentang pengertian dan ilustrasi data dari variable-variabel yang mempresentasikan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Saya menyambut gembira dengan diterbitkannya Buku Profil Kependudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah. Diharapkan melalui Buku Profil ini, dapat diidentifikasi permasalahan yang berhubungan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selanjutnya dengan diketahuinya berbagai masalah tersebut, diharapkan seluruh sektor terkait dapat merumuskan alternatif solusi pemecahannya.

Semoga penyusunan Buku Profil Kependudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan program pembangunan daerah yang berwawasan kependudukan.

Pandan, 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULIN TENGAH

FREDDY L. SITUMEANG, S.Sos, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640223 198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

SAMBUTAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 KEADAAN GEOGRAFIS 1

 1.2 PERKEMBANGAN PENDUDUK..... 2

BAB II GAMBARAN SKPD 6

 2.1 SEKILAS KEBERADAAN SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH..... 6

 2.2 VISI DAN MISI SKPD 7

BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN..... 8

 3.1 STRUKTUR ORGANISASI 8

 3.2 KEPEGAWAIAN..... 10

 3.2.1 Susunan Kepegawaian 10

BAB IV ASET DAN REALISASI BELANJA MODAL 12

 4.1 SARANA DAN PRASARANA..... 12

 4.2 REALISASI BELANJA MODAL 14

BAB V SUMBER DANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM..... 24

 5.1 SUMBER DANA DAN ANGGARAN 24

 5.2 HASIL PELAKSANAAN PROGRAM 30

 5.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM KELUARGA
 BERENCANA NASIONAL 31

 5.3.1 Hasil Pelayanan Peserta KB Baru..... 31

 5.3.1.1 Peserta KB Baru..... 32

 5.3.1.2. Perkiraan Permintaan Masyarakat
 Peserta KB Baru (PPM-PB)..... 34

 5.3.1.3 Persentase PB per PPM PB..... 34

 5.3.2 Hasil Pelayanan Peserta KB Aktif 35

 5.3.2.1 Perkiraan Permintaan Masyarakat
 Peserta KB Aktif (PPM-PA 37

 5.3.2.2 Persentase PA per PPM 37

 5.3.2.3 Peserta KB Baru Pasca Persalinan dan Keguguran
 Berdasarkan Metode Kontrasepsi 38

5.3.2.4	Unmetneed	38
5.3.3	Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	39
5.3.4	Tribina Kelompok Kegiatan	42
5.3.4.1	Kelompok Kegiatan Bina Keluarga	
	Balita (BKB)	42
5.3.4.2	Kelompok Kegiatan Bina Keluarga	
	Remaja (BKR).....	44
5.3.4.3	Bina Keluarga Lansia atau BKL	46
5.3.5	Kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).....	48
5.3.6	Kampung KB	49
5.3.7	Generasi Berencana.....	53
5.3.8	Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).....	54
5.3.9	Dampak Program KB Terhadap Aspek Demografi	55
BAB VI PENUTUP.....		56
6.1	KESIMPULAN	56
6.2	SARAN	56

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Alokasi dan Realisasi Anggaran DAK Fisik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2022	15
Gambar 4.2	: Alokasi dan Realisasi Anggaran DAK Non Fisik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2022	19
Gambar 5.1	: Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2022	25
Gambar 5.2	: Jumlah Pelayanan Peserta KB Baru Berdasarkan Metode Kontrasepsi Tahun 2022	32
Gambar 5.3	: Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi yang Dilayani Faskes Pemerintah dan Faskes Swasta Tahun 2018 s/d 2022	32
Gambar 5.4	: Kumulatif Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Yang Dilayani Oleh Faskes KB Pemerintah Tahun 2022	33
Gambar 5.5	: Kumulatif Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Yang Dilayani Oleh Faskes KB Swasta Tahun 2022	33
Gambar 5.6	: Pencapaian Peserta KB Baru (Faskes Kb Pemerintah Dan Swasta) Terhadap Perkiraan Permintaan Masyarakat Menjadi Peserta KB Baru (PPM-PB) Tahun 2022	34
Gambar 5.7	: Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2018 s/d 2022	35
Gambar 5.8	: Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2022	36
Gambar 5.9	: Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2022	36
Gambar 5.10	: Pencapaian Peserta KB Aktif (Faskes Kb Pemerintah Dan Swasta) Terhadap Perkiraan Permintaan Masyarakat Menjadi Peserta KB Aktif (PPM-PA) Tahun 2022	37
Gambar 5.11	: Persentase Unmetneed Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018 s/d Tahun 2022	39
Gambar 5.12	: Perkembangan Pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) pada Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018 s/d 2022	40
Gambar 5.13	: Kategori PPKBD menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022	40
Gambar 5.14	: Kategori Sub-PPKBD menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022	41

Gambar 5.15 : Perkembangan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018 s/d 2022	43
Gambar 5.16 : Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022	44
Gambar 5.17 : Perkembangan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018 s/d 2022	45
Gambar 5.18 : Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) Kab. Tapanuli Tengah Tahun 2022	45
Gambar 5.19 : Perkembangan Bina Kelompok Lansia (BKL) di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018 s/d 2022	47
Gambar 5.20 : Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022	2
Tabel 1.2	: Jumlah Penduduk Tapanuli Tengah Tahun 2022	3
Tabel 1.3	: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022	4
Tabel 3.1	: Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2022	11
Tabel 4.1	: Daftar Sarana dan Prasarana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022	13
Tabel 4.2	: Alokasi Anggaran DAK tiga tahun terakhir	15
Tabel 4.3	: Alokasi dan Realisasi Penggunaan DAK Fisik Tahun 2020 s/d 2022	16
Tabel 4.4	: Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) DAK Non Fisik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 s/d 2022	20
Tabel 5.1	: Data Pagu Anggaran APBD Kab, APBD Prov dan APBN Tahun 2020 s/d 2022	24
Tabel 5.2	: Realisasi Belanja APBD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 s/d 2022	25
Tabel 5.3	: Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Bersumber APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022	26
Tabel 5.4	: Persentase Unmetneed Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018 s/d 2022	38
Tabel 5.5	: Data Kampung KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022	49
Tabel 5.6	: Dampak Program KB Terhadap Aspek Demografi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018 s/d 2022	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KEADAAN GEOGRAFIS

Secara astronomis, Kabupaten Tapanuli Tengah terletak antara 1° 11' 00" sampai 2° 22' 0" Lintang Utara dan antara 98° 07' 0" sampai 98° 12' 0" Bujur Timur. Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan Provinsi Aceh di sebelah utara; Kabupaten Tapanuli Selatan di sebelah selatan; Kota Sibolga dan Samudra Hindia di sebelah barat; Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Pakpak Barat di sebelah timur. Kabupaten Tapanuli Tengah terletak di pesisir pantai barat Pulau Sumatera dengan panjang garis pantai 200 km. Selain daratan utama yang berada di Pulau Sumatera, wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah juga tersebar di beberapa pulau-pulau kecil. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut dan sungai. Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 2.194,98 kilometer persegi.

Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 20 kecamatan, dimana ibukotanya adalah Kecamatan Pandan. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan Potensi Desa (Podes) sejak tahun 1980. Sejak saat itu, Podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 kali dalam kurun waktu sepuluh tahun untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, ataupun Sensus Ekonomi. Dengan demikian, fakta penting terkait ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau perkembangannya secara berkala dan terus menerus.

Tabel 1.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
(1)	(2)	(3)
010	PINANGSORI	78,32
011	BADIRI	129,49
020	SIBABANGUN	284,64
021	LUMUT	105,98
022	SUKABANGUN	49,37
030	PANDAN	34,31
031	TUKKA	150,93
032	SARUDIK	25,92
040	TAPIAN NAULI	83,01
041	SITAHUIS	50,52
050	KOLANG	436,29
060	SORKAM	80,61
061	SORKAM BARAT	44,58
062	PASARIBU TOBING	103,36
070	BARUS	21,81
071	SOSOR GADONG	143,13
072	ANDAM DEWI	122,42
073	BARUS UTARA	63,02
080	MANDUAMAS	99,55
081	SIRANDORUNG	87,72
TAPANULI TENGAH		2.194,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tapanuli Tengah

Berdasarkan data dari BPS tahun 2022, diketahui bahwa Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kolang seluas 436,29 Km² (19,88%) dari seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, kecamatan terluas selanjutnya adalah 284,64 Km² (12,97%) dan terluas ketiga adalah Kecamatan Tukka seluas 150,93 Km² (6,88%).

Sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Barus seluas 21,81 Km² (0,99%), Kecamatan Sarudik menempati luas terkecil kedua yaitu 25,92 Km² (1,18%) dan Kecamatan Sorkam Barat terkecil selanjutnya yaitu 44,58 Km² (2,03%).

1.2 PERKEMBANGAN PENDUDUK

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Tapanuli Tengah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 374.734 orang, bertambah 5.434 jiwa dibandingkan penduduk tahun sebelumnya.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Tapanuli Tengah Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin Penduduk	Persentase terhadap Luas Kabupaten
		Laki - Laki	Perempuan	Total		
1	Pinangsori	13,095	12,898	25,993	101.53	3.57
2	Badiri	14,411	13,451	27,862	107.14	5.90
3	Sibabangun	9,394	9,303	18,697	100.98	12.97
4	Lumut	6,521	6,468	12,989	100.82	4.83
5	Sukabangun	2,053	1,993	4,046	103.01	2.25
6	Pandan	31,085	30,179	61,264	103.00	1.56
7	Tukka	7,450	7,367	14,817	101.13	6.88
8	Sarudik	11,414	11,715	23,129	97.43	1.18
9	Tapian Nauli	10,611	10,170	20,781	104.34	3.78
10	Sitahuis	3,010	3,026	6,036	99.47	2.30
11	Kolang	10,885	10,634	21,519	102.36	19.88
12	Sorkam	8,316	8,574	16,890	96.99	3.67
13	Sorkam Barat	9,103	8,982	18,085	101.35	2.03
14	Pasaribu Tobing	3,806	3,879	7,685	98.12	4.71
15	Barus	9,090	8,643	17,733	105.17	0.99
16	Sosor Gadong	7,415	7,531	14,946	98.46	6.52
17	Andam Dewi	8,194	8,329	16,523	98.38	5.58
18	Barus Utara	2,414	2,541	4,955	95.00	2.87
19	Manduamas	11,765	11,766	23,531	99.99	4.54
20	Sirandorung	8,708	8,545	17,253	101.91	4.00
	Tapanuli Tengah	188,740	185,994	374,734	101.48	100.00

Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas) Maret 2020

Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Dan berdasarkan tabel tersebut diketahui rasio kepadatan penduduk yaitu 171 artinya terdapat sejumlah 171 jiwa penduduk per kilometer persegi pada tahun 2022.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dapat dilihat pada tabel bahwa jumlah laki-laki sebanyak 188.740 orang dan perempuan 185.994 orang dengan Rasio Jenis Kelamin Laki-laki dibanding Perempuan adalah 101,48 artinya Jumlah laki-laki lebih banyak dibanding

perempuan bahwa dalam 101-102 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah 1,97 %, meningkat dibandingkan tahun 2021.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	15,203	14,554	29,757
2	5-9	17,706	16,864	34,570
3	10-14	18,917	18,216	37,133
4	15-19	19,633	18,395	38,028
5	20-24	18,425	16,867	35,292
6	25-29	17,314	15,778	33,092
7	30-34	16,442	15,374	31,816
8	35-39	13,927	12,845	26,772
9	40-44	12,192	11,256	23,448
10	45-49	10,484	10,083	20,567
11	50-54	8,501	8,883	17,384
12	55-59	6,927	7,751	14,678
13	60-64	5,298	6,517	11,815
14	65-69	3,733	5,163	8,896
15	70-74	2,388	3,679	6,067
16	75+	1,650	3,769	5,419
	Total	188,740	185,994	374,734

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah penduduk terbesar adalah kelompok umur 15 – 19 tahun sebanyak 38.028 orang. Sedangkan terkecil adalah kelompok umur 75+ sebanyak 5.419 orang.

Angka Beban Ketergantungan adalah Perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia non produktif (0-14) + (65+ ke atas) dengan kelompok usia produktif (15 s.d 64 tahun). Bersumber dari data BPS, jumlah kelompok usia non produktif sebanyak 121.842 jiwa dan

kelompok usia produktif sebanyak 252.892 jiwa. Artinya Angka Beban ketergantungan kelompok usia non produktif terhadap kelompok usia produktif adalah 48,18% artinya terdapat sebanyak 48 atau 49 jiwa penduduk usia non produktif pada setiap 100 jiwa penduduk produktif atau 2 orang usia produktif dapat menanggung 1 orang usia non produktif.

Berdasarkan istilah dari Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Population Fund (UNFPA)*), adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, dimana proporsi usia kerja (15-65 tahun) lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja (0-14 tahun dan >65 tahun). Secara angka, terjadinya Bonus Demografi dapat diukur dengan menurunnya rasio ketergantungan di suatu negara yang berarti proporsi usia produktif di negara tersebut meningkat. Namun, Bonus Demografi tidak dapat serta merta terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif besar, melainkan harus diiringi dengan peningkatan produktivitas dari penduduk usia kerja tersebut. UNFPA menyatakan bahwa suatu negara dapat menikmati bonus demografi ketika setiap orang menikmati kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kemandirian anak muda. Kondisi ini dapat terjadi ketika suatu negara yang memiliki potensi jumlah penduduk tersebut juga memiliki kebijakan yang baik. Setiap negara pasti melalui era Bonus Demografi dan ini hanya terjadi sekali dalam sejarah suatu bangsa. Apabila suatu negara tidak siap dalam menghadapi bonus demografi, maka yang terjadi justru adalah bencana demografi, salah satunya angka pengangguran yang tinggi dimana dapat menimbulkan potensi konflik sosial. Negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, saat ini sedang berada dalam era Bonus Demografi.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Berdasarkan data dari Tapteng Dalam Angka Tahun 2023, diketahui bahwa Usia Harapan Hidup Tahun 2022 adalah 67,58 tahun artinya rata-rata tahun hidup orang adalah usia 67-68 tahun.

BAB II

GAMBARAN SKPD

2.1 SEKILAS KEBERADAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Tipe A yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 6 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian Kewenangan Daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

Peran serta Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk menjadi salah satu pilar Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai dengan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mendukungnya dengan menitik beratkan pada pencapaian Misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yakni, “Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang bermutu bagi masyarakat”.

Tujuan Pengendalian Penduduk sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2017-2022 adalah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dengan Sasaran : Terlaksananya Pelayanan KB kepada Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I serta terlayannya PUS untuk menjadi peserta KB Baru dan Aktif.

2.2 VISI DAN MISI SKPD

Untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mendukungnya dengan menitik beratkan pada pencapaian Misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yakni, “Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang bermutu bagi masyarakat”.

Tujuan Pengendalian Penduduk sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2017-2022 adalah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dengan Sasaran : Terlaksananya Pelayanan KB kepada Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I serta Terlayannya PUS untuk menjadi peserta KB Baru dan Aktif.

Adapun **Visi** Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah adalah “**Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang Menuju Keluarga Berkualitas**”.

Dan Misi nya antara lain :

1. Meningkatkan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

Mengandung makna meningkatkan Komunikasi dan Informasi Edukasi (KIE) pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dengan pelayanan bermutu dan fasilitas berjangkau.

2. Meningkatkan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Mengandung makna meningkatkan peran dan fungsi keluarga melalui pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga serta kesehatan reproduksi remaja untuk menciptakan keluarga sejahtera.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan terhadap pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Menyelenggarakan upaya-upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Melakukan evaluasi atas hasil penyelenggaraan upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

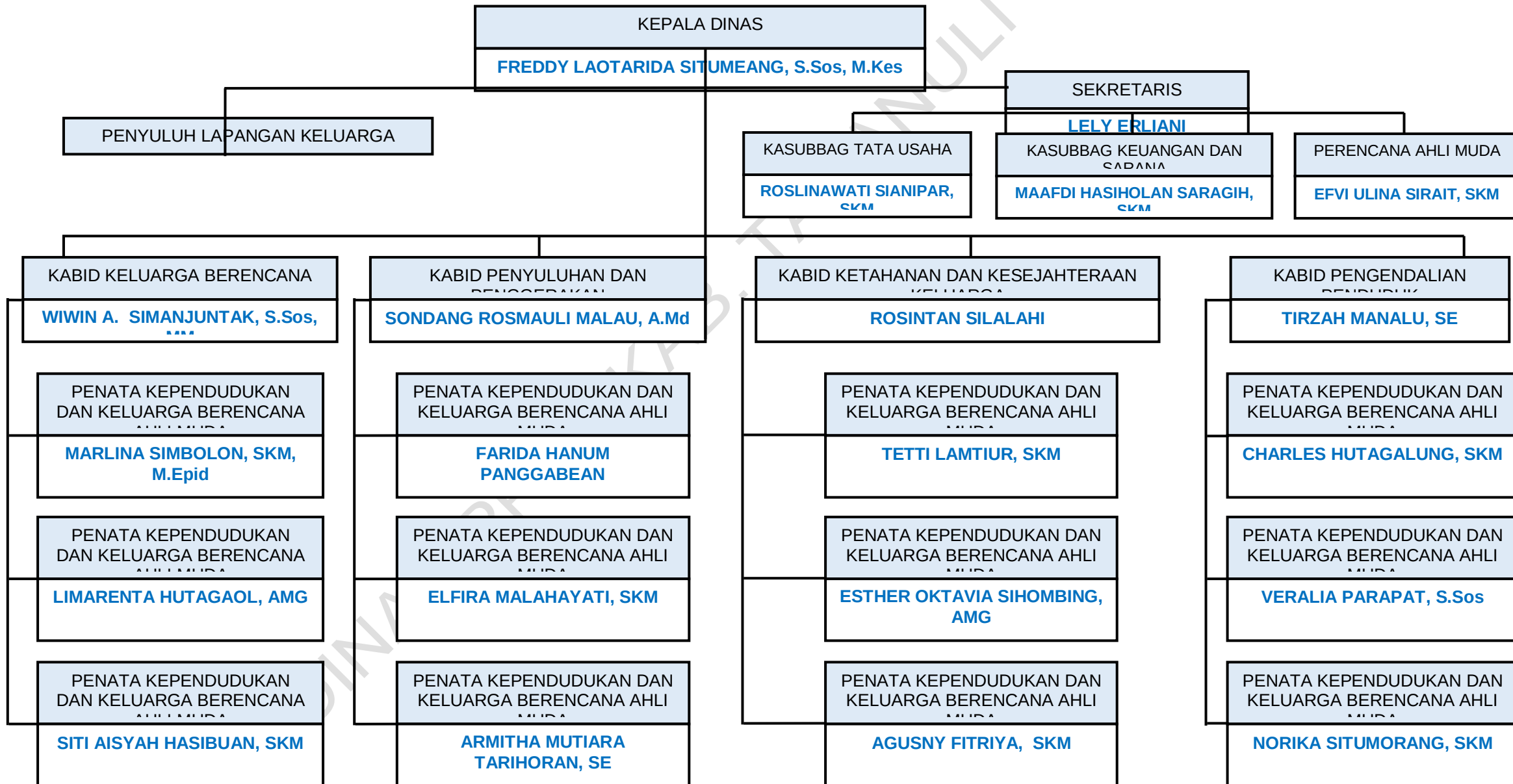
3.1 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 6 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah, susunan organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. SubBagian Perencanaan;
 - b. SubBagian Keuangan dan Sarana;
 - c. SubBagian Tata Usaha.
3. Bidang Pengendalian Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :
 - a. Seksi Penyuluh Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 - b. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - c. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Isntitusi Masyarakat Pedesaan
4. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.
5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia;
 - c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
6. BidangPengendalian Penduduk, membawahi :
 - a. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 - b. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
 - c. Seksi Data dan Informasi.
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana terlampir.

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH
(DPPKB)



3.2 KEPEGAWAIAN

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah sangat diperlukan adanya Sumber Daya Manusia selain itu tidak kalah pentingnya adalah asset yang berupa Peralatan dan Perlengkapan.

3.2.1 Susunan Kepegawaian

Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 120 orang terdiri dari PNS Laki-laki 14 orang dan PNS Perempuan 106 orang dengan jabatan yaitu Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 5 orang, Eselon IV sebanyak 2 orang, Fungsional Penata Kependudukan sebanyak 12 orang, Fungsional Perencana sebanyak 1 orang serta staf sebanyak 99 orang. Dari 99 orang staf, terdiri dari Penyuluh KB sebanyak 86 orang dan sebanyak 13 orang menjadi Fungsional Umum. Sedangkan Petugas Lapangan KB Non ASN sebanyak 218 orang dan Staf Non ASN sebanyak 4 orang.

Tabel 3.1
Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan Ruang
Tahun 2022

NO.	KATEGORI JABATAN	TENAGA / PEGAWAI s/d Desember 2022															TOTAL PEGAWAI		
		GOLONGAN KEPANGKATAN																	
		NON PNS			I			II			III			IV					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
A	TENAGA/PEGAWAI OPD-KB																		
	DARI SELURUH KABUPATEN/KOTA																		
	ESELON II													1			1		1
	ESELON III										1	3	4		1	1	1	4	5
	ESELON IV										1	1		1	1	2	1	1	2
	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB										1	11	12				1	11	12
	PERENCANA											1						1	1
	S T A F		1	3	4				1	1		2	9				4	13	17
	TOTAL (A)																		
B	PETUGAS LAPANGAN KB :																		
1	PPLKB (atau yang setingkat)								2	4			14				2	18	20
2	PKB								2	9		1	15				3	24	27
3	PPPK PUSAT																1	15	16
3	PLKB (ASN DAERAH)								8			1	14				1	22	23
4	NON PNS	51	167	218													51	167	218
	TOTAL (B)																		
	TOTAL (A + B)																66	276	342

Sumber : Subbag. Kepegawaian

Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur DPPKB belum cukup memadai dibanding dengan bidang tugas yang harus dikerjakan, sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih optimal.

Memperlancar pelaksanaan tugas-tugas, DPPKB Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya, melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

BAB IV

ASET DAN REALISASI BELANJA MODAL

4.1 SARANA DAN PRASARANA

Sebagai komponen yang sangat mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disamping kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah setiap tahunnya mengupayakan peningkatannya hal ini sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017–2022.

Sarana dan prasarana kerjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain sebagai berikut :

- a. Tanah perkantoran seluas 818 m2 yang di atasnya dibangun gedung kantor satu lantai dengan luas lantai 294 m2 yang terdiri dari Ruang Kerja Pimpinan, Ruang Kerja Bidang sebanyak 4 ruangan serta Ruang Kerja Sekretariat sebanyak 4 ruang, Ruang Pertemuan sebanyak1 ruang, dan Kamar mandi.
- b. Bangunang gudang seluas 209 m2.
- c. Gedung Balai Penyuluhan KB di 20 Kecamatan Sirandorung, Andam Dewi, Barus Utara, Sosorgadong, Sorkam Barat, Sorkam, Sarudik, Pasaributobing, Lumut, Sibabangun, Manduamas, Kolang, Tukka, Pandan, Badiri, Tapan Nauli, Barus, Sukabangun, Sitahuis, dan masing-masing seluas 50 m2.
- d. Kendaraan roda empat sebanyak 5 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 132 unit.
- e. PC sebanyak 14 unit, Personal Komputer sebanyak 12 unit, printer sebanyak 21 buah, Laptop sebanyak 22 unit, dan Note Book sebanyak 1 unit
- f. Overhead Projector sebanyak 10 buah serta layarnya sebanyak 10 buah.
- g. Telepon Mobile sebanyak 12 buah.
- h. Modem sebanyak 34 buah.
- i. CCTV1 Paket
- j. Camera Video sebanyak 4 buah.
- k. Camera Electronik sebanyak 3 buah
- l. Publik Address (Lapangan) sebanyak 14 buah.
- m. Emergency Kit sebanyak 14 unit.
- n. Papan Pengumuman/ Papan Motivasi KB sebanyak 10 buah.
- o. Peralatan lainnya berupa meja, kursi, whiteboard, AC, dan lain-lainnya sebagai pendukung pelaksanaan kerja.

Tabel 4.1
Daftar Sarana dan Prasarana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022

No	Uraian	Jl. Barang
A.	Golongan Tanah	1
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
B.	Golongan Peralatan dan Mesin	703
1	Bus (Penumpang 30 orang ke atas)	1
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1
3	Kendaraan Bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1
4	Sepeda Motor	100
5	Mobil Unit Penerangan Darat	1
6	Kendaraan Bermotor khusus lainnya (dst)	1
7	Lemari Penyimpanan	5
8	Lemari Besi/ Metal	8
9	Lemari Kayu	3
10	Filling Cabinet Besi	7
11	Brandkas	1
12	Lemari Kaca	2
13	White Board	1
14	Mesin Absensi	1
15	Overhead Projector	10
16	Papan Pengumuman	10
17	Meja Kerja Kayu	23
18	Kursi Besi/ Metal	32
19	Kursi Kayu	1
20	Meja Rapat	2
21	Tempat Tidur Besi (Obgyn Bed)	7
22	Kursi Rapat	24
23	Kursi Tamu	1
24	Kursi Putar	15
25	Kursi Lipat	24
26	A.C. Split	12
27	Kipas Angin	3
28	Exhause Fan	4
29	Televisi	1
30	Camera Video	3
31	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	4
32	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	2
33	Camera Electronic	2
34	Telephone Mobile	14
35	Publik Address (Lapangan)	14
36	Emergency Kit (Obgyn Bed)	14
37	Pompa Airasil	1
38	Meja Kerja	28
39	Alat Kesehatan Kerja Lainnya (dst)	3

40	P.C Unit	30
41	Laptop	23
42	Note Book	1
43	Personal Komputer lainnya	10
44	Printer (Peralatan Personal Komputer)	27
45	Kursi Fiber Glas/ Plastik	188
46	Modem	34
47	Peralatan Personal Komputer Lainnya	3
C.	Golongan Gedung dan Bangunan	23
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2
2	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1
3	Bangunan Rumah Sakit Lain (Gedung Balai Penyuluh)	18
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1
5	Tugu lainnya (Papan Motivasi)	1

Sumber : Subbag. Keuangan & Sarana

Selain Prasarana di atas, terdapat juga 48 Tempat Pelayanan KB yang tersebar di 20

Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah, antara lain :

1. 36 Unit Faskes :
 - a. Rumah Sakit Umum sebanyak 1 unit
 - b. Puskesmas sebanyak 25 unit
 - c. Praktik dokter sebanyak 4 unit
 - d. Klinik Pratama sebanyak 6 unit
2. Praktik Mandiri Bidan (setara Faskes) sebanyak 2 unit
3. Praktik Mandiri Bidan Jejaring sebanyak 10 unit

4.2 REALISASI BELANJA MODAL

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana setiap tahun dianggarkan Belanja Modal untuk pengadaan asset di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah. Pengadaan Aset selain dari Anggaran APBD Murni Kabupaten juga dari Anggaran DAK Bidang KB.

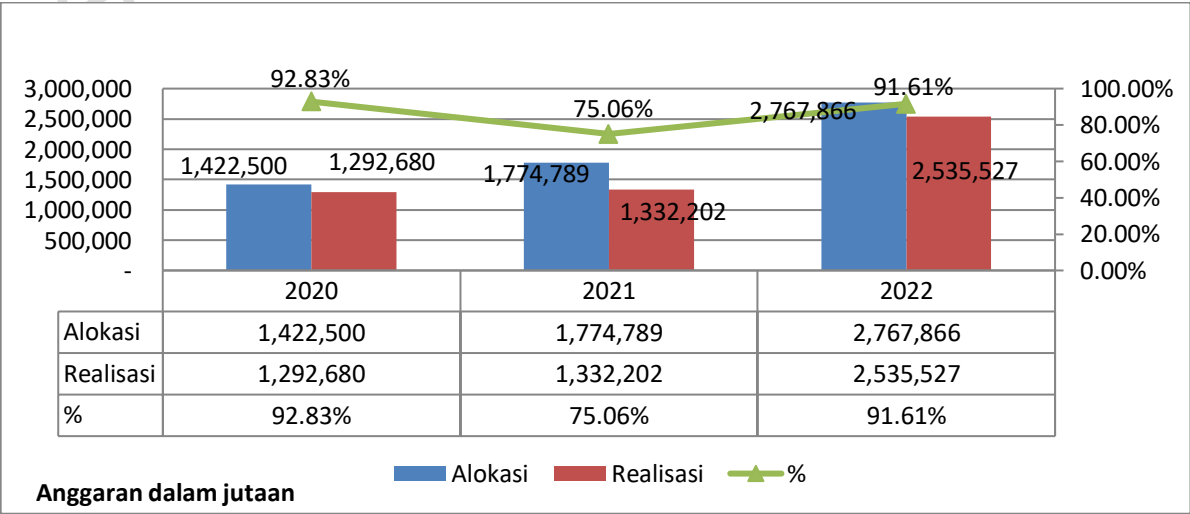
Tabel 4.2
Alokasi Anggaran DAK tiga tahun terakhir

URAIAN	2020	2021	2022
DAK BidangKB (Fisik)	Rp. 1.422.500.000,-	Rp. 1.774.789.000,-	Rp. 2.767.866.000,-
DAK BOKB (Non Fisik)	Rp. 5.583.991.000,-	Rp. 5.789.840.000,-	Rp. 5.944.001.000,-

Sumber : Subbag. Keuangan

Alokasi anggaran DAK Fisik yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.767.866.000,- mengalami peningkatan disbanding alokasi DAK Fisik Tahun 2021 sebesar Rp. 1.774.789.000,- dan mengalami peningkatan dibanding alokasi DAK Fisik tahun 2020 sebesar Rp. 1.422.500.000,-. Realisasi DAK Fisik tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.535.527.140,- atau sebesar 91,61 %. Realisasi DAK Fisik tahun Anggaran 2021 diketahui sebesar Rp. 1.332.202.515,- atau sebesar 75,06%. Persentase realisasi DAK Fisik tahun 2020 sebesar 92,83%. Realisasi DAK Fisik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2022 meningkat 16,55 poin bila dibandingkan dengan persentase realisasi DAK Fisik TA 2021 dan menurun 1,22 poin dibandingkan realisasi TA 2020. Perbandingan Alokasi dan realisasi anggaran bersumber DAK Fisik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 disajikan pada tabel 4.3 berikut di bawah ini, di mana dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran DAK Fisik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2022



Berdasarkan Gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi terhadap penyerapan atau realisasi anggaran DAK Fisik dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

Tabel 4.3
Alokasi dan Realisasi Penggunaan DAK Fisik
Tahun 2020 s/d 2022

DAK Fisik Tahun 2020

No	SUB BIDANG/KEGIATAN				REALISASI
		Satuan	Volume	Pagu DAK Fisik	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB				
	Pengadaan Lemari Obat/Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi)	unit	26	364.000.000	Rp 361.790.000
2	Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB				
	Pengadaan Mobil Distribusi Alokon	Unit	1	200.000.000	Rp 198.100.000
	Pengadaan Karoseri Mobil Distribusi Alokon	Paket	0	100.000.000	Rp -
3	Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan				
	1. BKB Kit	paket	11	69.300.000	Rp 68.655.400
	2. BKL Kit	Paket	10	57.000.000	Rp 56.947.000
	3. KIE Kit	Paket	11	55.000.000	Rp 54.934.000
4	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB				
	1. Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB	Paket	34	391.000.000	Rp 386.342.000
	2. Pengadaan Sarana Kerja PPKBD/Sub PPKBD	Paket	31	124.000.000	Rp 123.442.000
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan				
	1. Papan Nama Rumah Data	unit	0	500.000	Rp -
	2. Pengadaan Personal Computer dan Printer	Unit	0	17.100.000	Rp -
	3. Rak Buku	Unit	0	1.250.000	Rp -
	4. Display Data	unit	0	250.000	Rp -
	5. Leaflet Rumah Dataku	unit	0	600.000	Rp -
6	Pengadaan BKB Kit Stunting	Paket	5	42.500.000	Rp 42.470.450
JUMLAH				1.422.500.000	Rp 1.292.680.850

Sumber : Subbag. Keuangan

DAK Fisik Tahun 2021

No	SUB BIDANG/KEGIATAN				REALISASI
		Satuan	Vol	Pagu DAK Fisik	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Sarana Prasarana Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja				
	KIT Nikah Anti Stunting	unit	20	200,000,000	Rp 174,391,800
2	Pengadaan Sarana Prasarana Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)				
	BKB Kit Stunting	unit	5	90,000,000	Rp 88,792,000
3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				
	Pengadaan Laparoscopy dengan Kamera dan Monitor	Unit	1	1,086,000,000	Rp 1,067,108,715
JUMLAH				1.774.789.000	Rp 1.332.202.515

DAK Fisik Tahun 2022

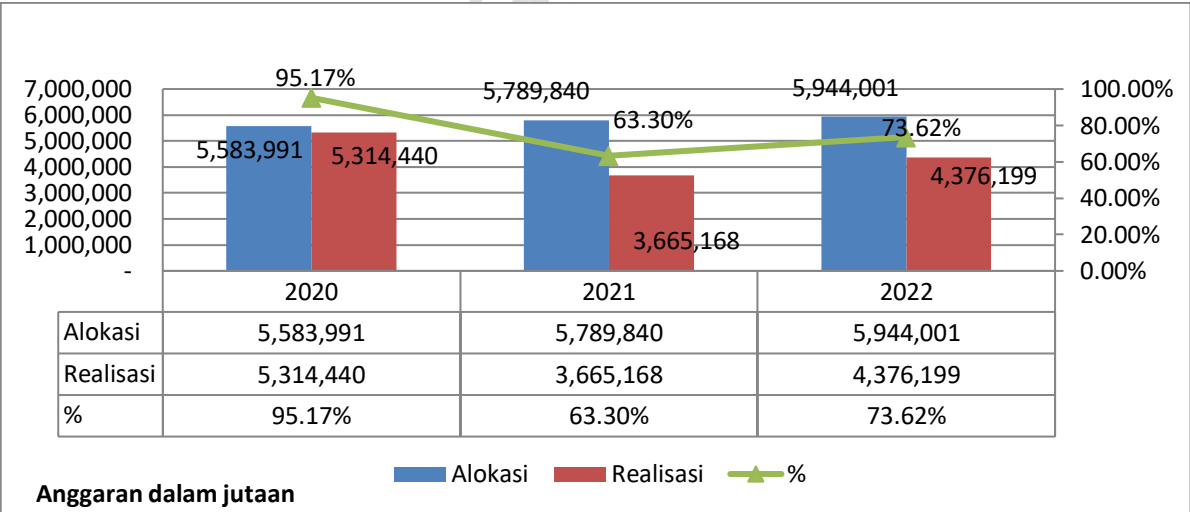
No	SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				REALISASI	
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam ribuan)	Keuangan	
						(Rp.Dalam ribuan)	(%)
1	2	3	4	5	6	12	13
I	SARANA PRASARANA TRANSPORTASI KB					788,900,000	
1	Pengadaan Kendaraan Jemput Antar Akseptor/Pendampingan Keluarga Stunting (Roda Dua)	32	unit	32 PLKB	960,000,000	788,900,000	82%
II	PENGADAAN SARANA PRASARANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING					546,396,640	
1	Pengadaan BKB Kit Stunting	24	Unit	24 Desa/Kelurahan	432,000,000	429,596,640	99%
2	Pengadaan Kit Siap Nikah	8	Unit	8 Desa/Kelurahan	120,000,000	116,800,000	97%
III	PENGADAAN SARANA PRASARANA PENDATAAN DAN PENYULUHAN KB DI BALAI PENYULUHAN KB					1,145,981,000	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana SIGA	19	unit	1 SKPD (DPPKB Kab Tap Tengah	570,000,000	554,477,000	97%

2	Pengadaaan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sitahuis		1	unit	1 Kecamatan	400,000,000	392,500,000	98%
3	Pekerjaan Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pinang Sori		1	Unit	1 Kecamatan	100,000,000	99,520,000	99.52%
4	Pekerjaan Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Barus		1	Unit	1 Kecamatan	100,000,000	99,484,000	99.48%
IV	KEGIATAN PENUNJANG						54,249,500	
1	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Reguler) - Tematik		7	Paket	1 SKPD (DPPKB Kab Tap Tengah	18,441,200	10,944,500	59%
	1)	Pagu Perencanaan dan Penganggaran Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Balai Sitahuis				7,000,000	6,944,500	99%
	2)	Jasa Konsultan Perencanaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Barus				2,000,000	2,000,000	100%
	3)	Jasa Konsultan Perencanaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pinang Sori				2,000,000	2,000,000	100%
2	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Reguler)		3	orang	1 SKPD (DPPKB Kab Tap Tengah	11,000,000	10,955,000	100%
	1)	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sitahuis				7,000,000	6,955,000	99%
	2)	Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Barus				2,000,000	2,000,000	100%
	3)	Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pinang Sori				2,000,000	2,000,000	100%
3	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Reguler)		1	Tahun	1 SKPD (DPPKB Kab Tap Tengah	514,800	0	0%
4	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Reguler)		1	Tahun	1 SKPD (DPPKB Kab Tap Tengah	33,910,000	32,350,000	95%
	TOTAL					2,767,866,000	2,535,527,140	91.61

Alokasi anggaran DAK BOKB (Non Fisik) yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp. 5.944.001.000,- mengalami peningkatan dibanding alokasi DAK Non Fisik tahun 2021 sebesar Rp. 5.789.840.000,- dan mengalami peningkatan dibanding alokasi DAK Non Fisik tahun 2020 sebesar Rp. 5.583.991.000,-. Realisasi DAK Non Fisik tahun Anggaran 2022 Rp. 4.376.199.469,- atau sebesar 73,62%. Persentase realisasi DAK Non Fisik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2022 meningkat 10,32 poin bila dibandingkan dengan persentase realisasi DAK Non Fisik TA 2021 yaitu 63,130% dan menurun 21,55 poin dibandingkan realisasi TA 2021 yaitu 95,17%. Alokasi dan realisasi anggaran bersumber DAK Non Fisik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 disajikan pada tabel 4.4 berikut di bawah ini, di mana perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2

Alokasi dan Realisasi Anggaran DAK Non Fisik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2022



Berdasarkan Gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa adanya fluktuasi terhadap persentase penyerapan atau realisasi anggaran DAK Non Fisik dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

Tabel 4.4
Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Keluarga Berencana (BOKB)
DAK Non Fisik Tahun 2020 s/d 2022

DAK Non Fisik Tahun 2020

NO		JENIS KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT		PERENCANAAN KEGIATAN	REALISASI PENGGUNAAN
			JUMLAH	SATUAN	(Rp)	(Rp)
1			6	7	5	8
I		OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN	19	Balai	2.100.317.000	1.860.264.000
	1	Biaya Operasional Penyuluhan KB			1.462.525.000	1.222.745.000
	2	Biaya Operasional Pengolahan Data			78.432.000	78.432.000
	3	Biaya Operasional lainnya			559.360.000	559.087.000
III		OPERASIONAL DISTRIBUSI ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI KE FASILITAS KESEHATAN	38	Faskes	92.264.000	92.264.000
	1	Biaya BBM dan/atau biaya transport			68.856.000	68.856.000
	2	Biaya jasa Pengiriman/ekspedisi			9.120.000	9.120.000
	3	Biaya Pendukung Distribusi Alkon Lainnya			14.288.000	14.288.000
III		OPERASIONAL PENGGERAKAN PROGRAM KKBPK DI KAMPUNG KB	20	Kampung KB	1.679.420.000	1.677.620.000
	1	Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) kampung KB			517.152.000	515.352.000
	2	Biaya operasional forum musyawarah tingkat desa kampung KB			311.734.000	311.734.000
	3	Lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di kampung KB			311.734.000	311.734.000
	4	Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (Poktan)			536.320.000	536.320.000
	5	Operasional Orientasi Kader			2.480.000	2.480.000
IV		OPERASIONAL PENCEGAHAN STUNTING	10	DESA/ KELURAHAN	217.190.000	217.190.000
	1	Operasional Kegiatan Penanganan Stunting			217.190.000	217.190.000
V		OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM KB BAGI MASYARAKAT OLEH KADER (PPKB/SUB PPKBD)	215	DESA/ KELURAHAN	1.290.000.000	1.290.000.000

	1	Biaya Persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader			860.000.000	860.000.000
	2	Biaya Pelaksanaan KIE oleh Kader			430.000.000	430.000.000
V	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN BOKB		20	KECAMATAN	101.000.000	99.822.800
	1	DUKUNGAN MEDIA KIE UNTUK KECAMATAN	20	Kecamatan	101.000.000	99.822.800
VI	DUKUNGAN MANAJEMEN		1	paket/kegiatan	103.800.000	77.279.840
	1	DUKUNGAN MANAJEMEN BOKB	1	OPD	103.800.000	77.279.840
TOTAL					5.583.991.000	5.314.440.640
PAGU APBN					5.583.991.000	

Sumber : Subbag. Keuangan

DAK Non Fisik Tahun 2021

NO		JENIS KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT		PERENCANAAN KEGIATAN	REALISASI PENGGUNAAN
			JUMLAH	SATUAN	(Rp)	(Rp)
1			6	7	5	8
I	Dukungan Operasional Kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB		19	Balai	1,407,900,000	702,773,000
	1	Biaya Operasional Penyuluhan KB			764,939,000	382,299,000
	2	Biaya Operasional Pengolahan Data			279,700,000	139,194,000
	3	Biaya Operasional lainnya			363,261,000	181,280,000
II	Biaya Operasional Pelayanan KB		38	Faskes	1,486,187,000	1.025.266.160
	1	Biaya Operasional Distribusi Alokon			69,198,000	34,157,200
	2	Biaya Operasional Visitasi dan Registrasi Faskes			20,900,000	20,900,000
	3	Biaya Operasional Penggerakan Pelayanan KB			1,396,089,000	970,208,960
III	Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB		20	Kecamatan	1,027,040,000	745.324.000
	1	Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB			284,640,000	213,144,000
	2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan			284,400,000	189,280,000

	3	Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (POKTAN)			458,000,000	342,900,000
IV	Operasional Penanganan Stunting		10	DESA/ KELURAHAN	613,700,000	478.745.500
	1	Operasional Pemahaman Kespro dan Stunting Bagi Calon Pengantin			278,200,000	277,535,500
		Operasional Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga			335,500,000	201,210,000
V	Operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)		215	DESA/ KELURAHAN	1,032,000,000	516.000.000
	1	Biaya Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran data oleh kader di wilayah kerjanya			774,000,000	387,000,000
	2	Pelaksanaan KIE oleh kader di wilayah kerjanya			258,000,000	129,000,000
VI	Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen		20	KECAMATAN	223,013,000	197.059.800
	1	Dukungan Media KIE	20	Kecamatan	120,640,000	101,635,050
	2	Dukungan Manajemen	1	OPD	102,373,000	95,424,750
TOTAL					5.789.840.000	5.583.991.640
PAGU APBN					5.789.840.000	

DAK Non Fisik Tahun 2022

No.	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan			
		Pagu	Jumlah Penerima Manfaat	Realisasi Penggunaan	Persentase Output
		(Rp.)	Jumlah	(Rp.)	%
(1)	(2)	(5)	(6)	(8)	(9=8/5)
I	Operasional Balai Penyuluhan KB	769,500,000	19	768,051,740	99.81
	1 Operasional Penyuluhan KB	285,000,000	19	284,376,000	
	2 Operasional Pengolahan Data	28,500,000	19	28,220,000	
	3 Operasional Pembinaan Kader IMP	38,000,000	19	37,860,000	
	4 Orientasi Tenaga Lini Lapangan	19,000,000	19	18,894,000	
	5 Langganan Daya dan Jasa	57,000,000	19	56,701,740	
	6 Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji Balai Penyuluhan KB	342,000,000	19	342,000,000	
II	Operasional Pelayanan KB	884,861,000	38	730,449,304	82.55
	1 Operasional Distribusi Alokon	17,100,000	38	17,032,902	

	2	Operasional Koordinasi Pelayanan KB di Faskes	3,000,000	1	3,000,000	
	3	Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	11,400,000	19	11,380,000	
	4	Operasional Penggerakan Pelayanan IUD	36,029,400	21	10,675,000	
	5	Operasional Penggerakan Pelayanan Implan	560,700,000	480	498,859,000	
	6	Operasional Penggerakan Pelayanan MOW	187,931,600	45	121,395,902	
	7	Operasional Penggerakan Pelayanan MOP	0	0	0	
	8	Operasional Pencabutan Implant	68,700,000	108	68,106,500	
III		Operasional Penggerakan di Kampung KB	638,250,000	37	635,828,000	99.62
	1	Operasional Pokja Kampung KB	83,250,000	37	82,940,000	
	2	Operasional Ketahanan Keluarga	555,000,000	37	552,888,000	
IV		Operasional Penurunan Stunting	2,368,175,000	9,708	1,046,387,123	44.19
	1	Operasional Pendampingan Calon Pengantin di desa	54,320,000	407	25,080,000	
	2	Operasional Pendampingan Ibu Hamil di desa	776,640,000	2,768	148,560,000	
	3	Operasional Pendampingan Pascapersalinan di desa	194,160,000	811	49,210,000	
	4	Operasional Surveillance Stunting tingkat desa (paket data untuk pelaporan)	986,400,000	822	467,903,123	
	5	Mini lokakarya Kecamatan	312,000,000	20	311,275,000	
	6	Audit kasus Stunting	40,000,000	1	39,704,000	
	7	Biaya cetak Data Keluarga (berisiko stunting)	4,655,000	931	4,655,000	
V		Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	1,132,015,000	215	1,118,545,000	98.81
	1	Operasional Pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	1,032,000,000	215	1,032,000,000	
	2	Dukungan Advokasi Program Bangga Kencana	4,375,000	1	3,725,000	
	3	Dukungan bahan media KIE (media cetak)	20,640,000	1	20,500,000	
	4	Dukungan bahan media KIE (media elektronik dan tradisional)	50,000,000	1	37,750,000	
	5	Dukungan bahan media KIE (momentum dan kearifan lokal)	25,000,000	1	24,570,000	
VI		Dukungan Manajemen dan SIGA	151,200,000	1	76,938,302	50.89
	1	Dukungan Manajemen	60,000,000	1	59,442,620	
	2	Dukungan SIGA (Paket data komunikasi di Balai Penyuluhan)	91,200,000	8	17,495,682	
	3	Dukungan SIGA (sewa langganan internet boradband)	0	0	0	
Total			5,944,001,000		4,376,199,469	73.62
Pagu APBN			5,944,001,000			

BAB V

SUMBER DANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM

5.1 SUMBER DANA DAN ANGGARAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan perlu didukung dengan Anggaran baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN Pusat. Selama ini Anggaran yang diberikan sebagai dukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 5.1
Data Pagu Anggaran APBD Kab, APBD Prov dan APBN
Tahun 2020 s/d 2022

ANGGARAN	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	JUMLAH
APBD KAB.	Rp. 8.003.795.805	Rp. 10.022.364.290	Rp. 9.055.032.722	Rp. 27.081.192.817,-
APBD PROV				-
APBN PUSAT	Rp. 7.000.491.000	Rp. 7.564.629.000	Rp. 8.711.867.000	Rp. 23.276.987.000
JUMLAH	Rp. 17.586.993.290	Rp. 17.586.993.290	Rp. 17.766.899.722	Rp. 50.358.179.817

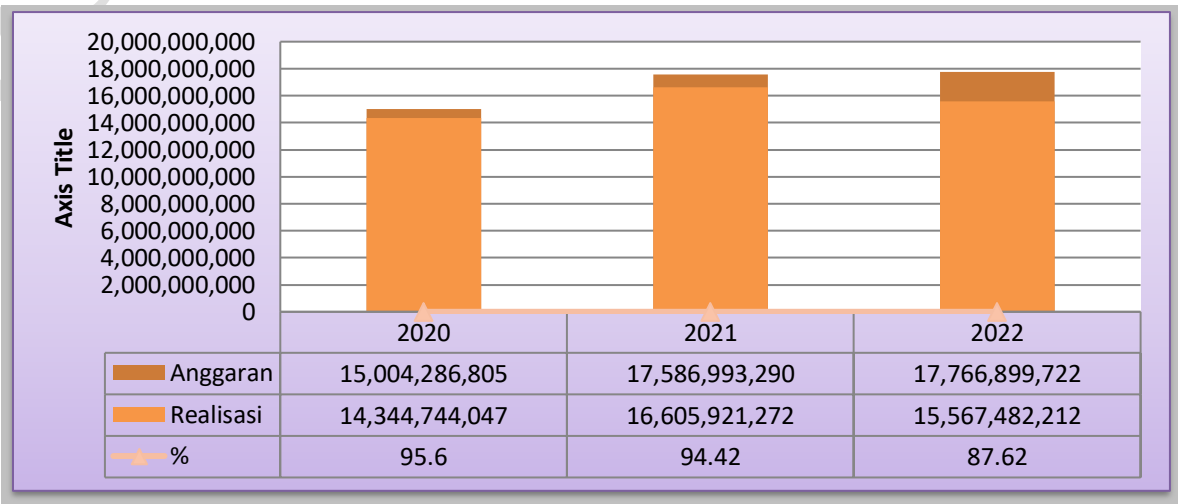
Alokasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp. Rp. 17.766.899.722 (*Tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*), dengan realisasi sebesar Rp. 15. 567.482.212 (*Lima belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah*) dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 17.586.993.290 (*Tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), dengan realisasi sebesar Rp. 16.605.921.272,- (*Enam belas milyar enam ratus lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*). Mengalami peningkatan dibanding alokasi anggaran APBD tahun 2020 sebesar Rp. 15.004.286.805,- (*Lima belas milyar empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah*), dengan realisasi Rp. 14.345.338.047,- (*Empat belas milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah*).

Tabel 5.2
Realisasi Belanja APBD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tapanuli Tengah
Tahun 2020 s/d 2022

ANGGARAN	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Anggaran	Rp. 15.004.286.805,-	Rp. 17.586.993.290	Rp. 17.766.899.722
Realisasi	Rp. 14.344.744.047,-	Rp. 16.605.921.272,-	Rp. 15. 567.482.212
Persentase Penyerapan (%)	95,60%	94,42%	87,62%

Realisasi Alokasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp. 15.567.482.212 (*Lima belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah*) atau sebesar 87,62% dan menurun dibandingkan tahun 2021, diketahui sebesar Rp. 16.605.921.272,- (*Enam belas milyar enam ratus lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua puluh tujuh dua rupiah*) atau sebesar 94,42%. Persentase realisasi anggaran APBD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2022 menurun 6,8 poin bila dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran APBD TA 2021 dan menurun 7,98 poin dibandingkan realisasi TA 2020 yaitu 95,60%. Alokasi dan realisasi anggaran bersumber APBD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 disajikan pada tabel 5.2, di mana perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2020-2022



Tabel 5.3
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tapanuli Tengah Bersumber APBD Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun Anggaran 2022

	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	SUMBER DANA
			KEUANGAN	FISIK (%)		
			Rp	%		
	3	8	13	14	15	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5,346,216,610	5,037,974,230	94.23%	308,242,380	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,499,440	12,339,570	98.72%	159,870	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,499,940	7,444,510	99.26%	55,430	DAU
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,499,740	1,486,450	99.11%	13,290	DAU
04	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	999,900	989,080	98.92%	10,820	DAU
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,499,860	2,419,530	96.79%	80,330	DAU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,661,811,000	4,404,646,131	94.48%	257,164,869	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,661,811,000	4,404,646,131	94.48%	257,164,869	DAU
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15,000,000	12,980,000	86.53%	2,020,000	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,000,000	12,980,000	0.00%	2,020,000	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254,637,180	245,630,427	96.46%	9,006,753	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,340	14,921,000	99.47%	79,340	DAU
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34,999,910	33,021,260	94.35%	1,978,650	DAU
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37,027,980	36,606,000	98.86%	421,980	DAU
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,526,950	10,677,120	64.60%	5,849,830	DAU
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,082,000	786,300	72.67%	295,700	DAU

09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,000,000	149,618,747	99.75%	381,253	DAU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139,220,190	137,312,860	98.63%	1,907,330	
05	Pengadaan Mebel	19,997,230	19,965,160	99.84%	32,070	DAU
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	99,974,500	98,347,700	98.37%	1,626,800	DAU
09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0.00%	0	-
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,248,460	19,000,000	98.71%	248,460	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200,048,800	168,757,163	84.36%	31,291,637	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	4,000,000	100.00 %	0	DAU
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,000,000	54,832,763	73.11%	20,167,237	DAU
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,500,000	19,010,000	97.49%	490,000	DAU
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101,548,800	90,914,400	89.53%	10,634,400	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63,000,000	56,308,079	89.38%	6,691,921	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29,500,000	25,093,661	85.06%	4,406,339	DAU
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33,500,000	31,214,418	93.18%	2,285,582	DAU
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0.00%	0	-
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	355,703,586	273,075,356	76.77%	82,628,230	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	65,000,000	58,720,600	90.34%	6,279,400	
05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	65,000,000	58,720,600	90.34%	6,279,400	DAU
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	290,703,586	214,354,756	73.74%	76,348,830	

02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	44,968,720	44,735,514	99.48%	233,206	DAU
03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	9,999,830	9,883,980	98.84%	115,850	DAU
11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	9,535,226	9,491,260	99.54%	43,966	DAK NON FISIK (BOKB)
13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	151,200,000	76,938,302	50.89%	74,261,698	DAK NON FISIK (BOKB)
14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	74,999,810	73,305,700	97.74%	1,694,110	DAU
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9,128,404,870	8,724,579,844	95.58%	403,825,026	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,382,995,360	1,360,408,240	98.37%	22,587,120	
01	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	54,374,940	52,463,440	96.48%	1,911,500	DAK NON FISIK (BOKB), DAU
02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	74,999,930	69,542,250	92.72%	5,457,680	DAK NON FISIK (BOKB), DAU
03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	0	0	0.00%	0	-
04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	103,564,850	91,137,840	88.00%	12,427,010	DAK NON FISIK (BOKB), DAU
06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	340,555,640	339,508,970	99.69%	1,046,670	DAK NON FISIK (BOKB), DAU
07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	769,500,000	768,051,740	99.81%	1,448,260	DAK NON FISIK (BOKB)
08	Pengendalian Program KKBPK	40,000,000	39,704,000	99.26%	296,000	DAK NON FISIK (BOKB)
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3,731,000,000	3,727,266,890	99.90%	3,733,110	
01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	65,000,000	61,266,890	94.26%	3,733,110	DAU
02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	0	0	0.00%	0	DAU, DAK FISIK REGULER
03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2,634,000,000	2,634,000,000	100.00 %	0	DAU

04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,032,000,000	1,032,000,000	100.00 %	0	DAK NON FISIK (BOKB)
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	3,188,866,290	2,822,381,144	88.51%	366,485,146	
01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17,100,000	17,032,902	99.61%	67,098	DAK NON FISIK (BOKB)
03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	884,760,980	730,029,062	82.51%	154,731,918	DAK NON FISIK (BOKB), DAU
06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2,185,240,000	1,982,370,500	98.47%	202,869,500	DAK FISIK REGULER SUB BIDANG KB
08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3,000,000	3,000,000	100.00 %	0	DAK NON FISIK (BOKB)
10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	98,765,310	89,948,680	91.07%	8,816,630	DAU
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	825,543,220	814,523,570	98.67%	11,019,650	
01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	99,999,530	91,929,000	91.93%	8,070,530	DAU
02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	44,000,190	43,780,090	99.50%	220,100	DAU
03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	681,543,500	678,814,480	99.60%	2,729,020	DAK NON FISIK (BOKB), DAU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,936,574,706	1,531,852,782	52.16%	1,404,721,924	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2,831,543,406	1,426,904,982	50.39%	1,404,638,424	
01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	79,999,640	79,231,420	99.04%	768,220	DAU
02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	566,068,590	558,396,640	100.00 %	7,671,950	DAK FISIK REGULER SUB BIDANG KB,DAU
03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	49,907,936	49,255,859	98.69%	652,077	DBH CHT

04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	49,797,240	49,267,940	98.94%	529,300	DAU
05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	2,011,520,000	690,753,123	34.34%	1,320,766,877	DAK NON FISIK (BOKB)
06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	74,250,000	0	0.00%	74,250,000	DBH CHT
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	105,031,300	104,947,800	99.92%	83,500	
04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	105,031,300	104,947,800	99.92%	83,500	DAU
		17,766,899,772	15,567,482,212	87.62%	2,199,417,560	

Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi

Penyediaan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dilakukan secara terpusat dengan alokasi anggaran pengadaan alokon dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pendamping Implan di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Adapun Jenis-jenis Alokon yang terdistribusi antara lain :

- 1. Suntikan
 - a. 1 Bulanan
 - b. 3 Bulanan Kombinasi
 - c. 3 Bulanan Progestin
- 2. PIL
 - a. Kombinasi
 - b. Progestin
- 3. Kondom
- 4. Implan
 - a. 1 Batang
 - b. 2 Batang
- 5. IUD

5.2 HASIL PELAKSANAAN PROGRAM

Sebagai bukti keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan Tahun 2022 perlu dilakukan pencatatan.

Hasil Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

Pelaksanaan Program Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Dinas PPKB mempunyai kekuatan sebagai berikut:

1. Petugas Lapangan KB (PLKB) yang bertugas di Tingkat Desa/Kelurahan dan telah dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan tentang Program KB, seperti Pelatihan Dasar Umum Program KB, Pelatihan Lanjutan Program KB, Pelatihan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Pelatihan Konseling Inter Personal (KIP) dan Pelatihan-pelatihan Pendukung lainnya.
2. Telah dimilikinya Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebanyak 215 orang atau setiap Desa/Kelurahan terdapat satu orang petugas PPKBD.
3. Sub PPKBD memiliki wilayah kerja di setiap Dusun/RW se-Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jumlah 841 Dusun/RW dan hanya 531 Sub-PPKBD, untuk membantu kegiatan perkembangan Kependudukan dan KB.
4. Telah terbentuk nya Kampung KB di sebanyak 38 Kampung KB yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Adanya jaminan ketersediaan alat kontrasepsi, sarana/prasarana, dan pembiayaan pelayanan KB.
6. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk.
7. Prasarana kendaraan roda 4 dan 2 cukup memadai.
8. Adanya dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun.

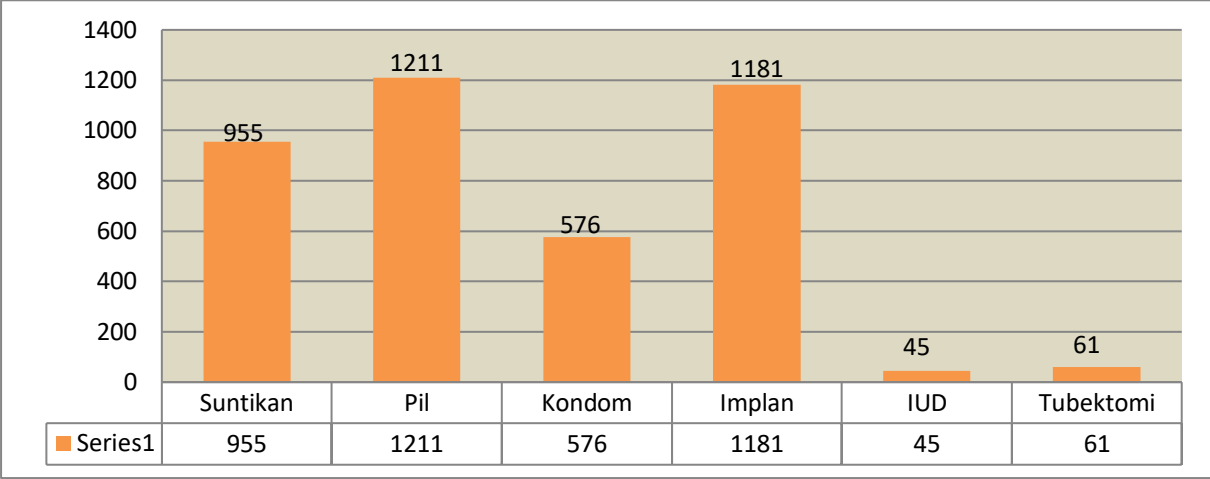
5.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Secara garis besar Hasil Kegiatan Operasional yang dapat dicapai dapat di uraikan sebagai berikut:

5.3.1 Hasil Pelayanan Peserta KB Baru.

Alat kontrasepsi dibagi menjadi dua, yaitu metode MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan non MKJP. MKJP adalah metode kontrasepsi yang sekali pemakaiannya untuk 3 tahun hingga seumur hidup, sedangkan non MKJP pemakaiannya berkisar 1 sampai 3 bulan saja. Berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan yang dikembangkan Dinas PPKB Kabupaten Tapanuli Tengah dapat diketahui partisipasi masyarakat menjadi peserta KB baru menurut Metode Kontrasepsi, ditampilkan pada grafik di bawah ini :

Gambar 5.2
Jumlah Pelayanan Peserta KB Baru Berdasarkan Metode Kontrasepsi Tahun 2022

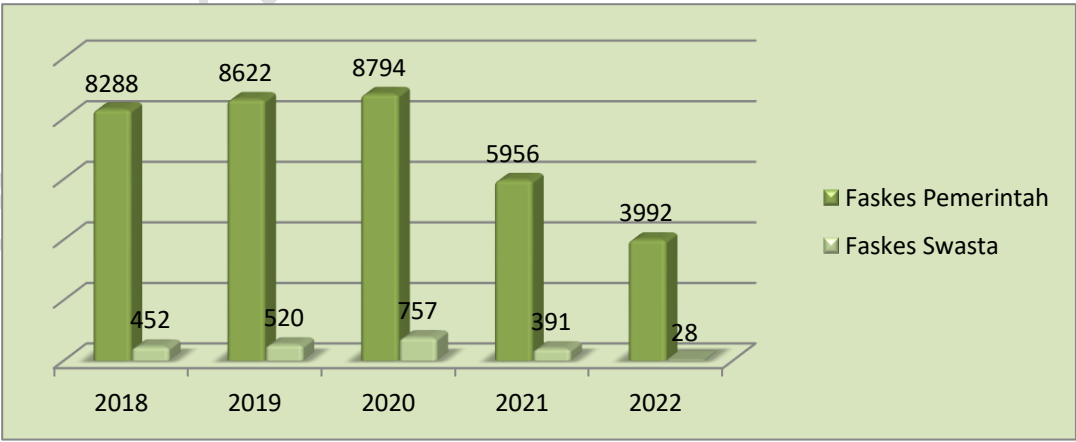


Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa peserta KB baru yang dilayani oleh Faskes KB berdasarkan Metode Kontrasepsi pada tahun 2022 antara lain suntikan 955 akseptor, Pil sebanyak 1211 akseptor, kondom sebanyak 576 akseptor, Implan sebanyak 1181 akseptor, IUD sebanyak 45 akseptor dan Tubektomi sebanyak 61 akseptor.

5.3.1.1 Peserta KB Baru

Berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan yang dikembangkan Dinas PPKB Kabupaten Tapanuli Tengah dapat diketahui partisipasi masyarakat menjadi peserta KB baru, ditampilkan pada grafik di bawah ini :

Gambar 5.3
Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi yang Dilayani Faskes Pemerintah dan Faskes Swasta Tahun 2018 s/d 2022

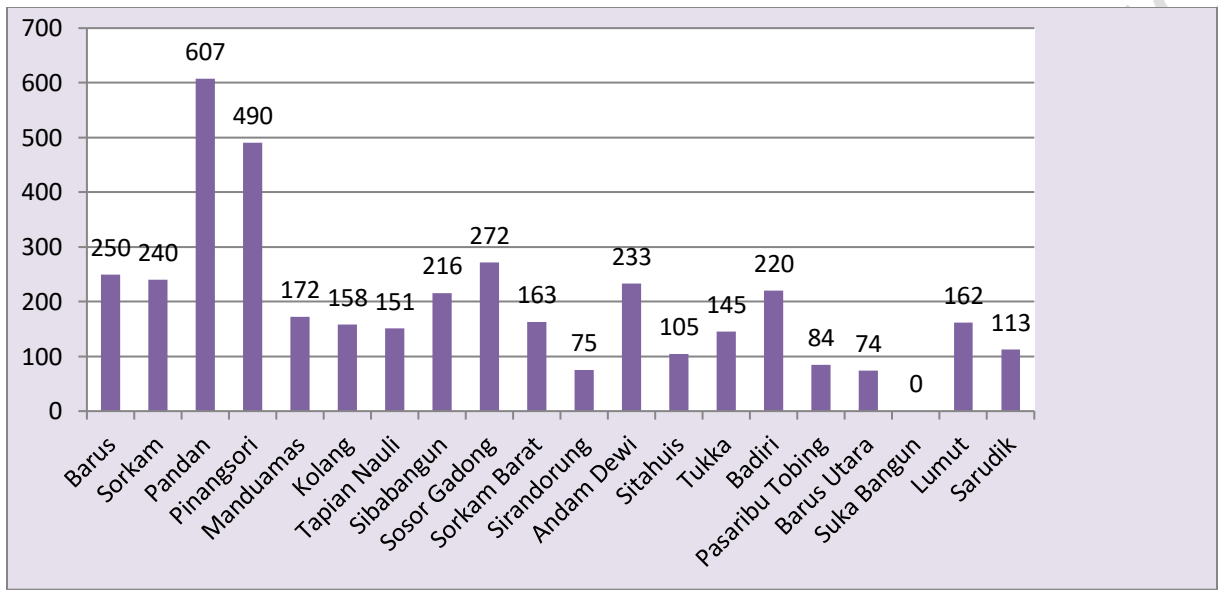


Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa peserta KB baru yang dilayani oleh Faskes KB Pemerintah mengalami fluktuasi dari tahun 2018 ketahun 2022 dimana pada tahun 2018 peserta KB baru sebesar 8.288 akseptor dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebanyak 8622 akseptor, pada tahun 2020 sebanyak 8.794 akseptor dan pada tahun 2021 menurun kembali menjadi 5.956 akseptor dan kembali turun

pada tahun 2022 yaitu 3.992 akseptor.

Sedangkan Peserta KB baru yang dilayani Faskes Swasta tidak mengalami perbedaan yang signifikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yaitu pada tahun 2018 sebanyak 452 akseptor, pada tahun 2019 sebanyak 520 akseptor, tahun 2020 sebanyak 757 akseptor dan pada tahun 2021 sebanyak 391 akseptor dan pada tahun 2022 sebanyak 28 akseptor.

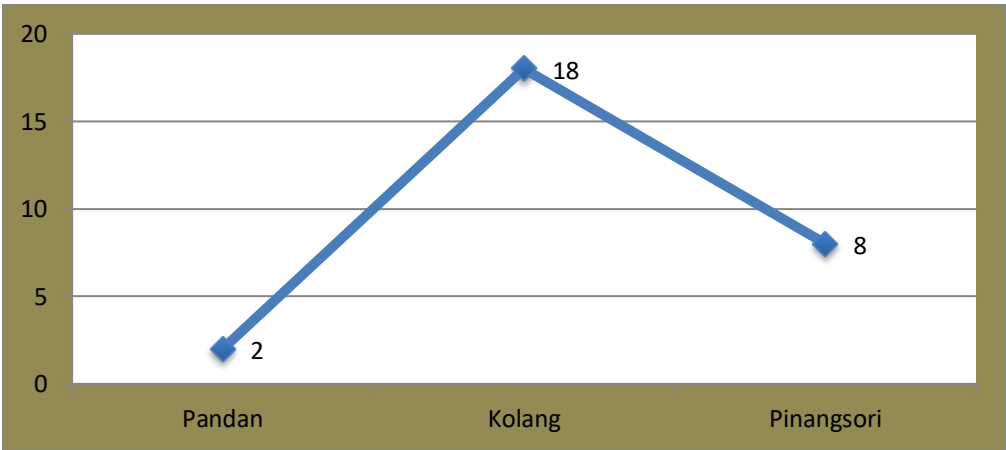
Gambar 5.4
Kumulatif Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Yang Dilayani Oleh Faskes KB Pemerintah Tahun 2022



Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa Kecamatan yang melayani akseptor baru terbanyak adalah Kecamatan Pandan sebanyak 607 akseptor. Sedangkan Kecamatan yang melayani akseptor paling sedikit adalah Kecamatan Sukabangun yaitu tidak ada akseptor.

Sedangkan untuk akseptor baru yang dilayani oleh Faskes Swasta dapat dilihat pada gambar 5.4. di bawah ini.

Gambar 5.5
Kumulatif Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Yang Dilayani Oleh Faskes KB Swasta Tahun 2022



Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa Kecamatan yang melayani akseptor baru terbanyak adalah Kecamatan Kolang sebanyak 18 akseptor. Sedangkan Kecamatan yang melayani akseptor paling sedikit adalah Kecamatan Pandan yaitu sebesar 2 akseptor.

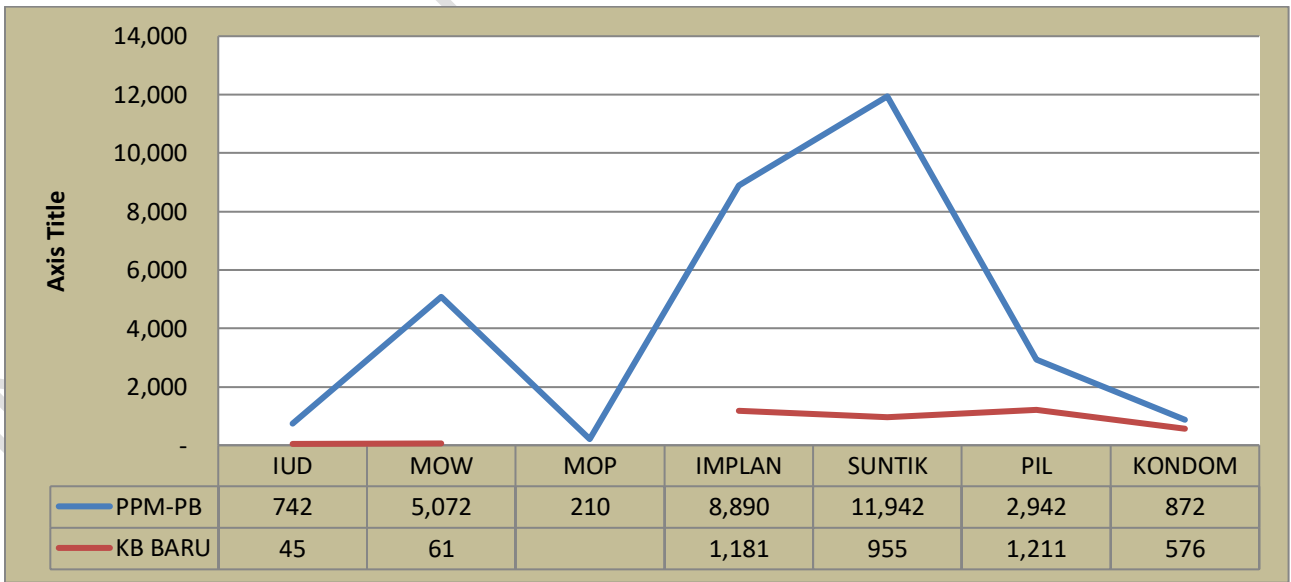
5.3.1.2 **Perkiraan Permintaan Masyarakat Peserta KB Baru (PPM-PB)**

Jumlah perkiraan permintaan masyarakat peserta KB Baru (PB) semua metode dalam satu tahun di suatu wilayah. PPM adalah perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB yang didasarkan pada trend masa lalu dan kebijakan ke depan pemakaian kontrasepsi serta dinamika faktor penentu fertilitas dalam rangka mencapai sasaran angka fertilitas total yang telah ditetapkan.

5.3.1.3 **Persentase PB per PPM PB**

Persentase Peserta KB Baru (PB) terhadap PPM-PB adalah persentase jumlah peserta KB Baru terhadap jumlah perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi peserta KB baru (PPM-PB). Sedangkan peserta/akseptor KB Baru (PB) adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat/obat kontrasepsi atau yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau abortus.

Gambar 5.6
Pencapaian Peserta KB Baru (Faskes Kb Pemerintah Dan Swasta)
Terhadap Perkiraan Permintaan Masyarakat
Menjadi Peserta KB Baru (PPM-PB)
Tahun 2022



Peserta KB baru pada tahun 2022 di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 4.029 peserta, dengan rincian Intra Uterine Device sebanyak 45 peserta (6,06%), Metode Operasi Wanita sebanyak 61 peserta

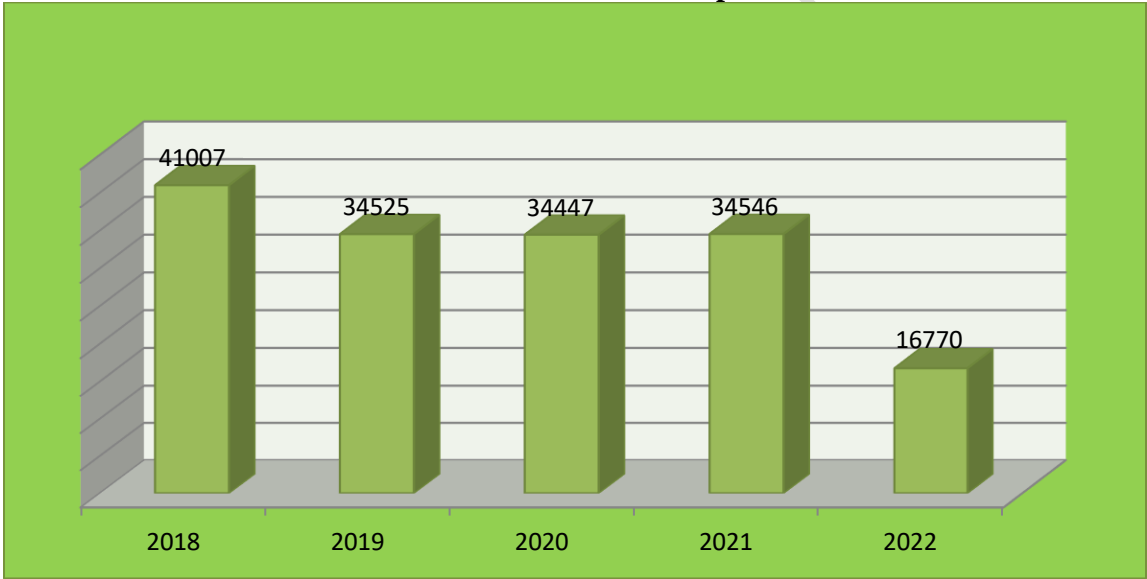
(1,20%), Metode Operasi Pria sebanyak 0 peserta (0%), Kondom sebanyak 576 peserta (66,06%), Implan sebanyak 1181 peserta (13,28%), Suntikan sebanyak 955 peserta (8,00%) dan PIL sebanyak 1.211 peserta (41,16%).

Pencapaian KB Baru terhadap Perkiraan Permintaan Masyarakat Peserta KB Baru (PPM-PB) sampai dengan bulan Desember tahun 2022 telah tercapai sebanyak 4.029 (34,17%) dari PPM PB sebesar 11.791.

5.3.2 Hasil Pelayanan Peserta KB Aktif

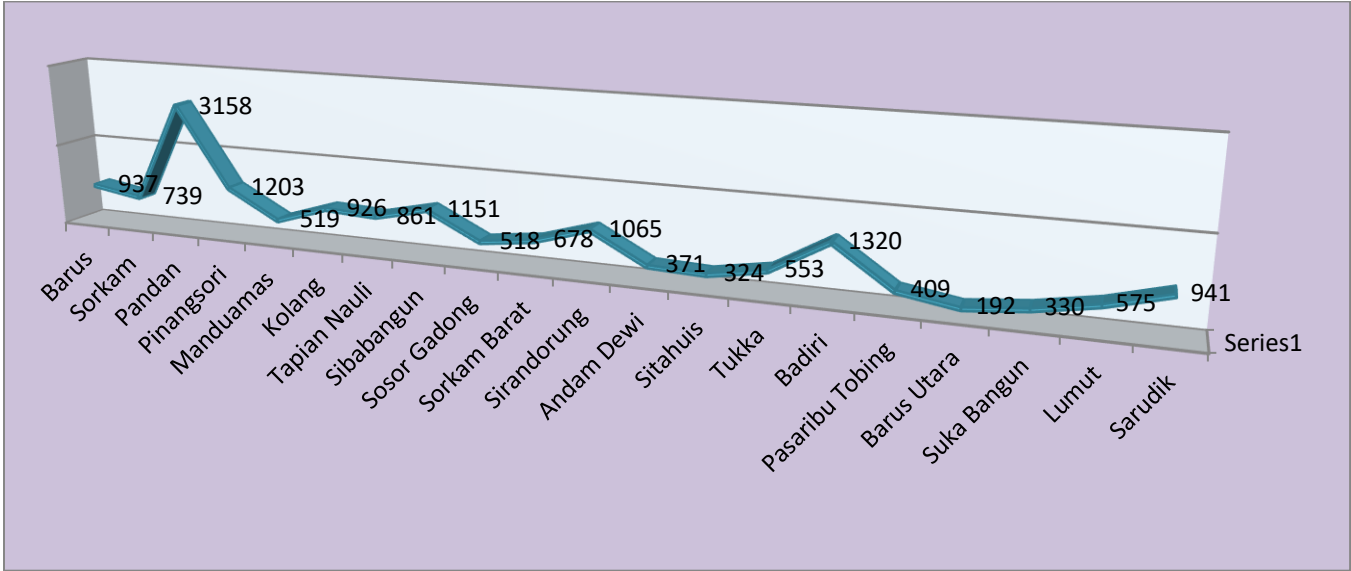
Berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan yang dikembangkan Dinas PPKB Kabupaten Tapanuli Tengah dapat diketahui partisipasi masyarakat menjadi peserta KB Aktif, ditampilkan pada grafik di bawah ini :

Gambar 5.7
Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2018 s/d 2022



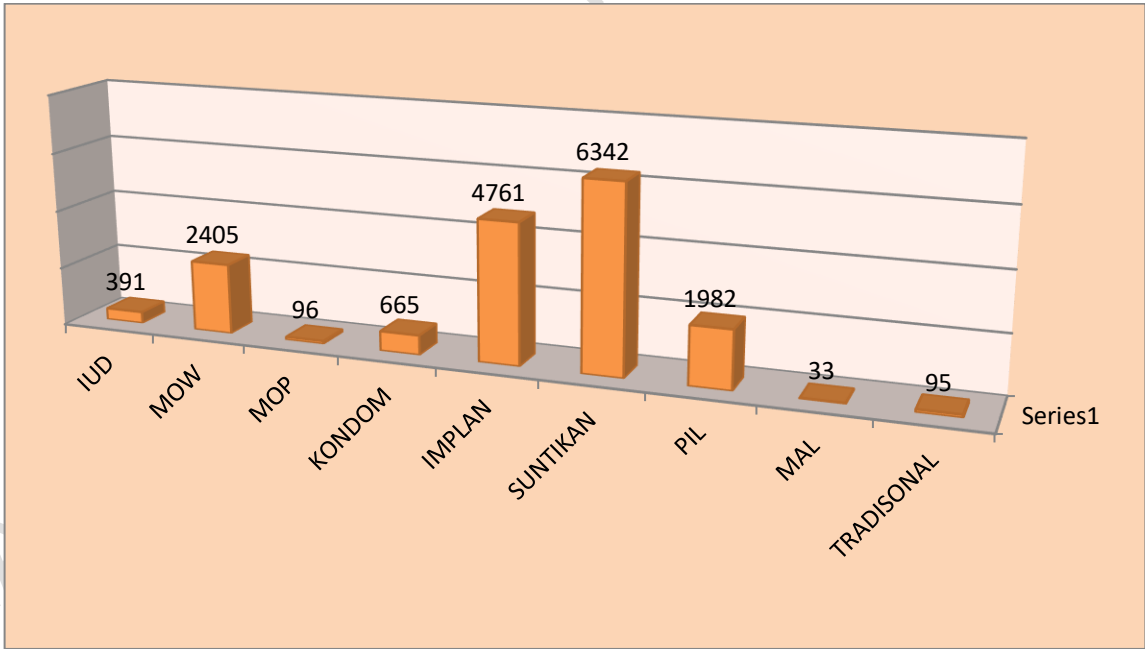
Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa peserta KB Aktif mengalami fluktuasi dari tahun 2018 ketahun 2022 dimana pada tahun 2018 peserta KB Aktif sebesar 41.007 akseptor sedang kan pada tahun 2019 sebanyak 34.525 akseptor dan pada tahun 2020 sebanyak 34.447 akseptor dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 34.546 akseptor. Dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 16.770 akseptor.

Gambar 5.8
Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan
Tahun 2022



Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa Kecamatan yang melayani akseptor KB aktif terbanyak adalah Kecamatan Pandan sebanyak 3.158 akseptor. Sedangkan Kecamatan yang melayani akseptor KB Aktif paling sedikit adalah Kecamatan Barus Utara yaitu sebesar 192 akseptor.

Gambar 5.9
Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi
Tahun 2022



Berdasarkan gambar 5.8 di atas dapat dilihat bahwa peserta KB aktif paling banyak menggunakan alat kontrasepsi Suntikan yaitu sebesar 6.342 peserta (37,82%). Dan selanjutnya terbanyak kedua adalah menggunakan alat kontrasepsi Implan sebesar 4.761 peserta (28,39%) dan ketiga adalah alat komtrasepsi MOW sebanyak 2.405 peserta (14,34%). Ini menggambarkan bahwa pada tahun 2022, alat kontrasepsi yang paling diminati oleh peserta KB adalah Suntikan.

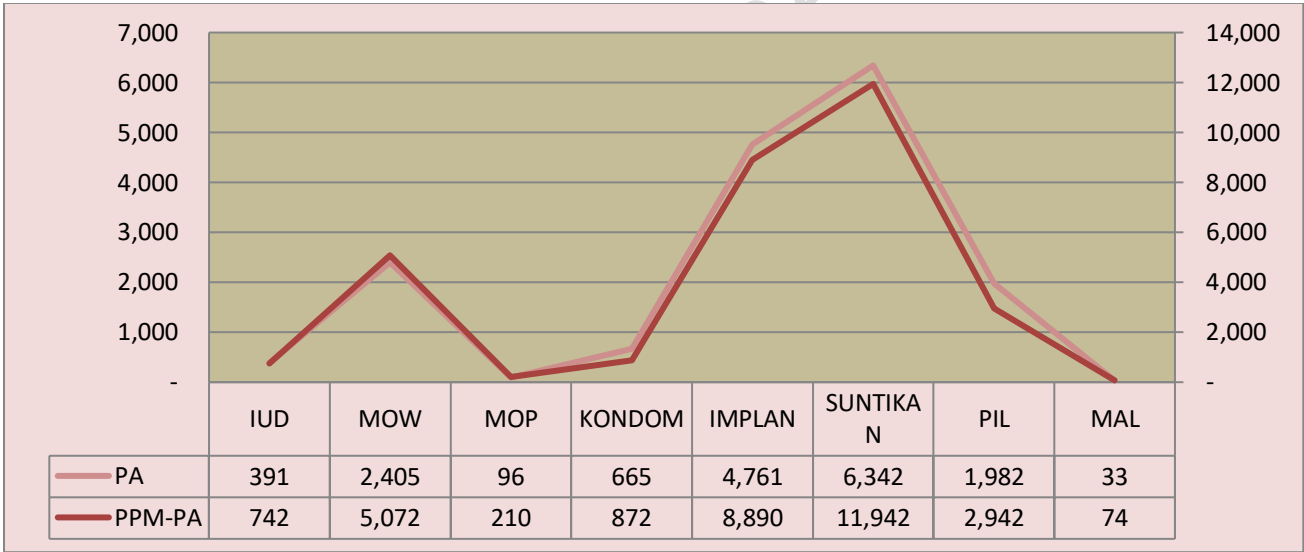
5.3.2.1 Perkiraan Permintaan Masyarakat Peserta KB Aktif (PPM-PA)

Jumlah perkiraan permintaan masyarakat peserta KB Aktif (PA) semua metode dalam satu tahun di suatu wilayah. PPM adalah perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB yang didasarkan pada trend masa lalu dan kebijakan ke depan pemakaian kontrasepsi serta dinamika faktor penentu fertilitas dalam rangka mencapai sasaran angka fertilitas total yang telah ditetapkan.

5.3.2.2 Persentase PA per PPM

Presentase Peserta KB Aktif (PA) terhadap PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) PA adalah persentase jumlah peserta KB Aktif terhadap jumlah perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi peserta KB Aktif (PPM PA). Peserta KB aktif (PA) adalah Pasangan Usia Subur yang pada saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi.

Gambar 5.10
Pencapaian Peserta KB Aktif (Faskes Kb Pemerintah Dan Swasta)
Terhadap Perkiraan Permintaan Masyarakat
Menjadi Peserta KB Aktif (PPM-PA)
Tahun 2022



Peserta KB Aktif pada tahun 2022 di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 16.770 peserta, dengan rincian Intra Uterine Device sebanyak 391 peserta (52,70%), Metode Operasi Wanita sebanyak 2.405 peserta (47,72%), Metode Operasi Pria sebanyak 96 peserta (45,71%), Kondom sebanyak 665 peserta (76,26%), Implan sebanyak 4.761 peserta (53,55%), Suntikan sebanyak 6.342 peserta (53,11%), PIL sebanyak 1.982 peserta (67,37%) dan MAL sebanyak 33 peserta (44,59%).

Pencapaian KB Aktif terhadap Perkiraan Permintaan Masyarakat Peserta KB Aktif (PPM-PA) sampai dengan bulan Desember tahun 2022 telah tercapai sebanyak 16.770 (54,68%) dari PPM PA sebesar 30.670.

5.3.2.3 Peserta KB Baru Pasca Persalinan dan Keguguran Berdasarkan Metode Kontrasepsi

KB Pasca Persalinan (PP) merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode/ alat/ obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan, sedangkan KB Pasca Keguguran (PK) merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat/ obat kontrasepsi setelah mengalami keguguran sampai dengan kurun waktu 14 hari.

Berdasarkan data dari Pencatatan dan Pelaporan di New SIGA, maka diketahui bahwa Peserta KB Baru Pasca Persalinan berdasarkan Metode Kontrasepsi sebanyak 29 akseptor, dengan rincian suntikan 10 orang akseptor, PIL 11 orang akseptor, Kondom 4 orang akseptor, dan Implan 4 orang akseptor.

Sedangkan untuk data Peserta Baru Pasca Keguguran berdasarkan Metode Kontrasepsi sebanyak 2 orang akseptor dengan rincian suntikan 2 orang akseptor.

5.3.2.4 Unmetneed

Unmetneed dapat didefinisikan sebagai kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya.

Perkiraan Unmet need Idealnya dengan program KB yang berjalan dengan baik, perkiraan *unmet need* di suatu wilayah dapat diturunkan. Peningkatan atau penurunan *unmet need* bisa terjadi karena berbagai hal antara lain karena sosial demografi dan ekonomi juga karena akses layanan, kualitas suplai dan pelayanan KB, kurangnya informasi, pertentangan di keluarga dan masyarakat, kurangnya informasi, hambatan dari suami, keluarga dan komunitas serta rendahnya persepsi terhadap resiko kehamilan.

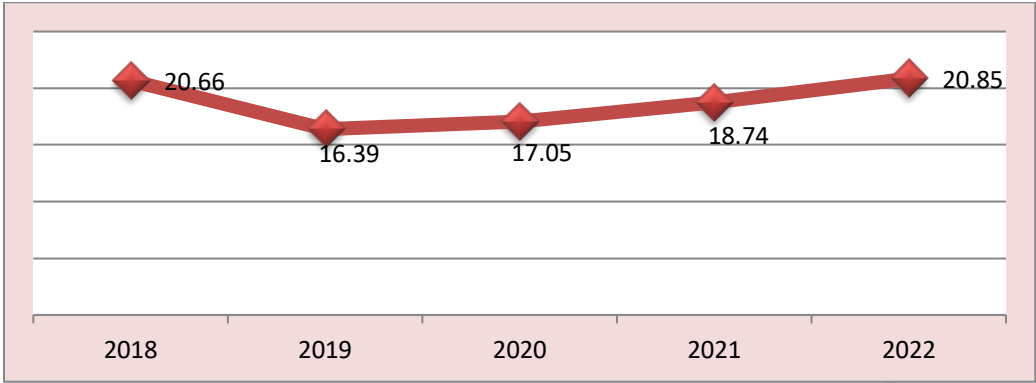
Tabel 5.4
Persentase Unmetneed Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2018 s/d 2022

TAHUN	INGIN ANAK DITUNDA (IAT)	TIDAK INGIN ANAK LAGI (TIAL)	TOT (IAT + TIAL)	PUS	PERSENTASE (%)
2018	4321	4621	8942	54550	16.39
2019	3597	4656	8253	48405	17.05
2020	4328	4914	9242	49326	18.74
2021	4008	4216	8224	48130	17.09
2022	5021	8551	13572	39415	34.43

Dari tahun 2018 sampai dengan 2022, persentase Unmet need mengalami fluktuasi. Merujuk kepada Renstra BKKBN Sumut tahun 2020-2024, target Unmet need sampai dengan tahun 2024 sebanyak 8,11%.

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Tapanuli Tengah belum mencapai target. Persentase Unmet need tahun 2022 senilai 34,43%. Persentase Unmet need terendah pada tahun 2018 yaitu 16,39% sedangkan tertinggi pada tahun 2022 yaitu 34,43%.

Gambar 5.11
Persentase Unmetneed Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2018 s/d Tahun 2022



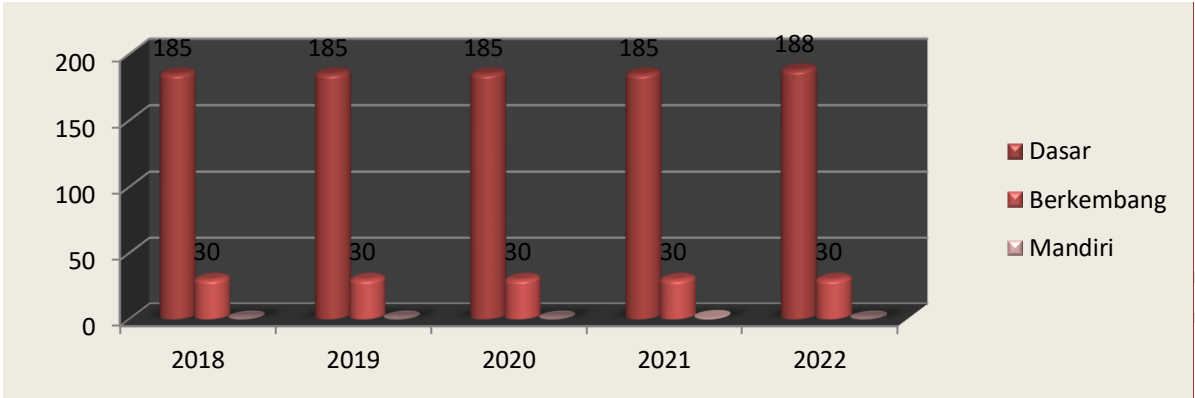
5.3.3 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Salah satu solusi dalam upaya membangun Indonesia dimulai dari keluarga adalah dengan maksimalisasi peran dan kompetensi Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini adalah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan Sub PPKBD). Sebagaimana kita ketahui bahwa peranan para institusi ini terhadap keberhasilan program KB cukup besar, para institusi merupakan **“UJUNG TOMBAK”** bagi pelaksanaan program KB di lini lapangan.

Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) pada butir ke-5 “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia” pada poin pertama yakni Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Untuk mewujudkan kualitas hidup manusia yang terdiri dari pendidikan, kesehatan dan daya beli sehingga pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dapat mengurangi kuantitas/ jumlah penduduk disatu sisi dan meningkatkan kualitas di sisi lainnya.

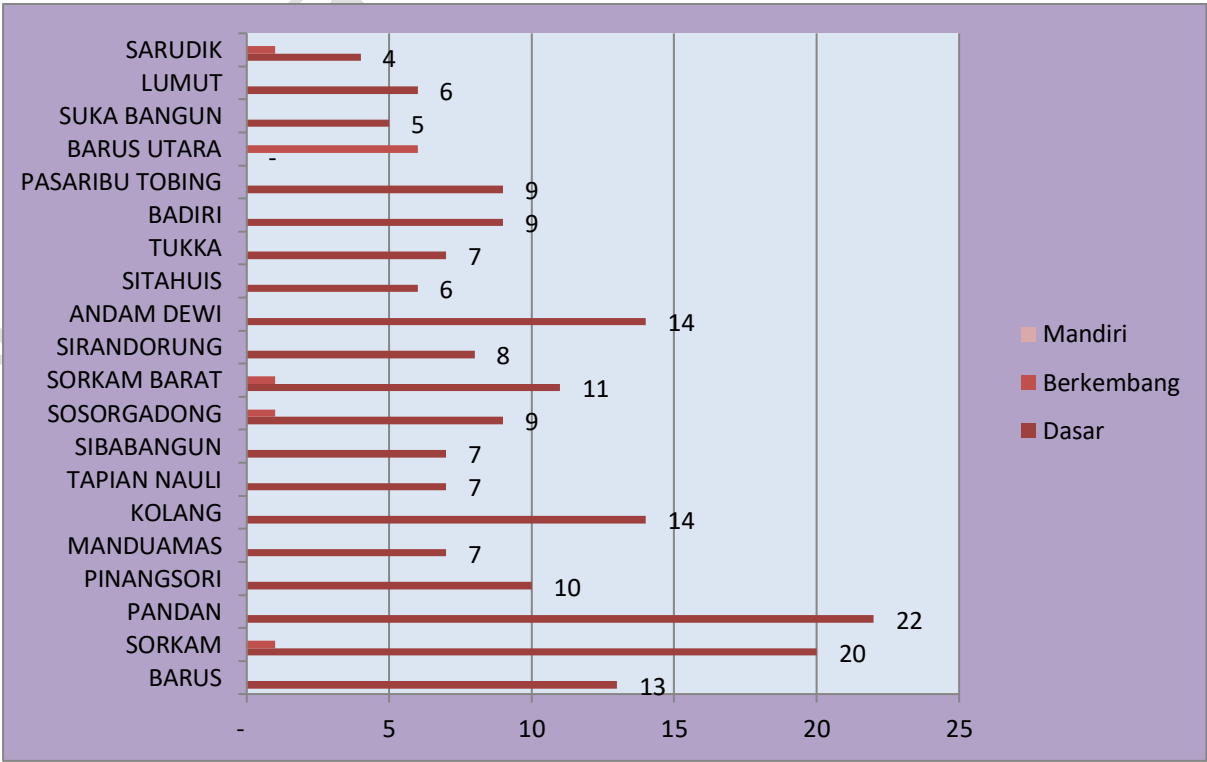
Pada Grafik di bawah ini ditampilkan perkembangan Pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) pada Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2018 s/d 2022.

Gambar 5.12
Perkembangan Pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) pada Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018 s/d 2022



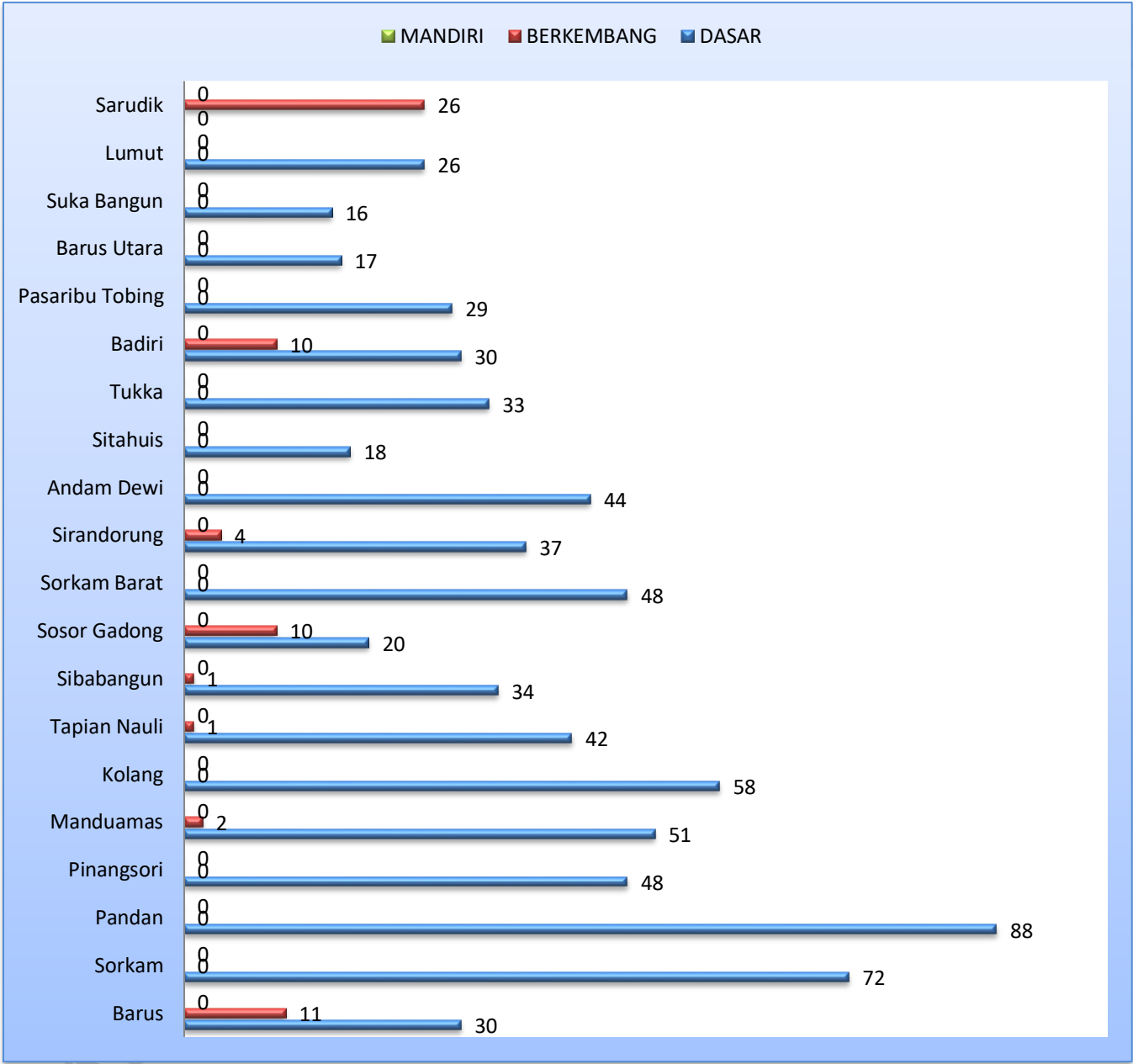
Sesuai dengan jumlah Desa/ Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu 215 Desa/ Kelurahan, maka banyaknya PPKBD di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah memenuhi target yaitu 215 PPKBD, sehingga nilai aspek kuantitasnya yaitu 100% (warna biru). Adapun rinciannya adalah kategori Dasar sebanyak 195 PPKBD, kategori Berkembang sebanyak 3 PPKBD dan kategori Mandiri sebanyak 3 PPKBD. Dari tahun 2018 sampai dengan 2022, keberadaan PPKBD tidak mengalami perubahan, baik jumlah maupun perubahan kategori. Hal ini dapat disebabkan kurangnya pembinaan kepada kader (PPKBD) sehingga PPKBD Kategori Dasar tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menuju Berkembang atau Mandiri.

Gambar 5.13
Kategori PPKBD menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022



Berdasarkan grafik di atas, hanya 5 Kecamatan yang sudah memiliki PPKBD kategori Berkembang dan hanya Kecamatan Sarudik yang PPKBDnya seluruhnya kategori Berkembang. Namun belum ada Kecamatan yang memiliki PPKBD kategori Mandiri.

Gambar 5.14
Kategori Sub-PPKBD menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022



Berdasarkan grafik di atas, terdapat 8 Kecamatan yang sudah memiliki sub-PPKBD kategori Berkembang dan hanya Kecamatan Sarudik yang seluruh sub-PPKBD nya sudah kategori Berkembang. Namun belum ada Kecamatan yang memiliki sub-PPKBD kategori Mandiri.

Sesuai dengan jumlah Dusun/ lingkungan di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu 841 Dusun/ lingkungan, maka banyaknya Sub-PPKBD di Kabupaten Tapanuli Tengah belum memenuhi target yaitu 477 Sub-PPKBD sehingga aspek kuantitasnya senilai 92,17% (BIRU). Dari tahun 2018 sampai dengan

2022, keberadaan Sub-PPKBD hanya sedikit perubahan, baik jumlah maupun perubahan kategori. Hal ini dapat disebabkan kurangnya pembinaan kepada kader (sub-PPKBD) sehingga sub-PPKBD Kategori Dasar tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menuju Berkembang atau Mandiri.

Perkembangan keberadaan institusi tersebut dapat di sampaikan sebagai berikut :

5.3.4 Tribina Kelompok Kegiatan

5.3.4.1 Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)

Kegiatan dalam kelompok BKB sendiri bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran Ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak yang berusia balita.

Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana cara memantau tumbuh kembang anak dengan melakukan kegiatan stimulasi yang bersifat fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral.

Kegiatan dalam BKB sendiri bagi anak agar dapat merangsang fisik, motorik, kecerdasan sosial dan emosional, serta moralnya yang berlangsung dalam proses interaksi antara Ibu atau anggota keluarga lainnya dengan anak balita.

Manfaat mengikuti kelompok BKB bagi Ibu dan anak

Dalam prinsipnya kelompok BKB dapat membantu Ibu dan anggota keluarga lainnya untuk mendidik anak, namun selain itu terdapat manfaat lainnya yang dapat Ibu dan anak bisa petik, yaitu:

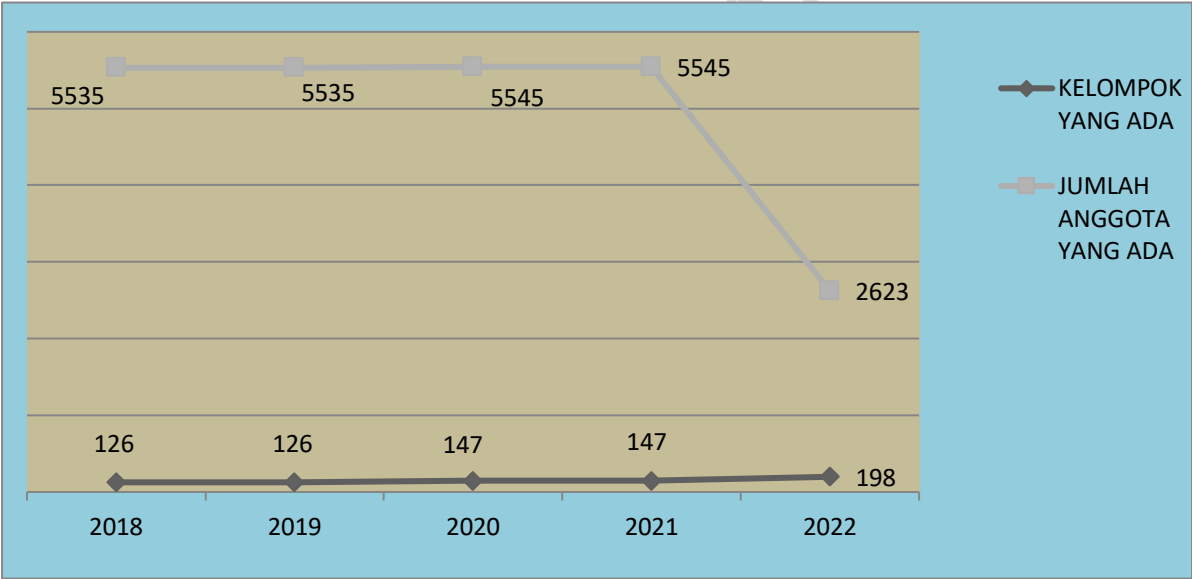
- Untuk dapat mengurus dan merawat anak balita serta pandai membagi waktu dan mengasuh anak
- Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak yang benar
- Untuk meningkatkan keterampilan dalam hal mengasuh dan mendidik anak balita
- Supaya lebih terarah dalam cara pembinaan anak
- Agar mampu mencurahkan perhatian dan kasih sayang terhadap anak sehingga tercipta ikatan batin yang kuat antara orang tua dan anak.
- Agar mampu membentuk anak yang berkualitas.

Manfaat bagi anak:

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Berkepribadian luhur
- Tumbuh dan berkembang secara optimal
- Cerdas, trampil, dan sehat
- Memiliki dasar kepribadian yang kuat guna perkembangan selanjutnya.

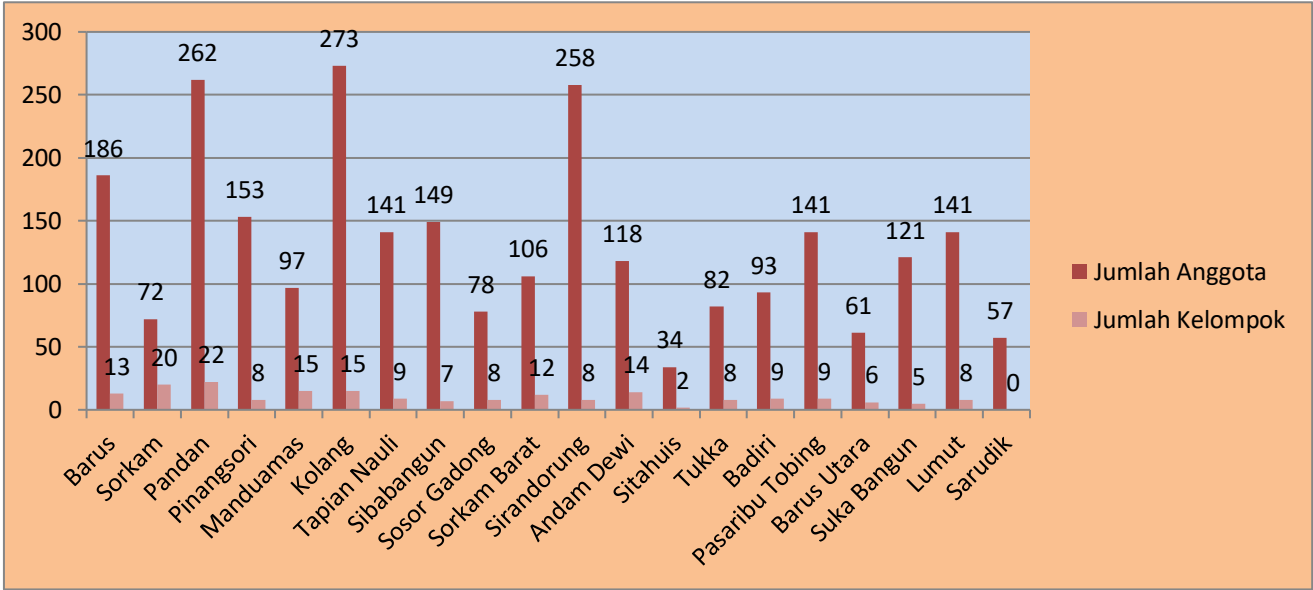
Jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dari tahun 2018 sampai akhir tahun 2022 sebanyak 147 kelompok. Adapun perkembangan dari kelompok Kegiatan BKB ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 5.15
Perkembangan Bina Keluarga Balita (BKB)
Di Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2018 s/d 2022



Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah kelompok binaan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan sesuai dengan jumlah anggota kelompok yang dibina. Pada tahun 2018 jumlah kelompok binaan sebanyak 126 kelompok dan anggotanya 5.535 anggota. Sedangkan pada tahun 2022 sudah mencapai 198 kelompok dengan jumlah anggota 2.623 anggota.

Gambar 5.16
Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022



Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah terbentuk kelompok BKB. Anggota kelompok terbanyak di Kecamatan Kolang yaitu 273 orang dengan 15 kelompok. Rata-rata anggota dalam setiap kelompok sebanyak 18 orang. Sedangkan jumlah anggota kelompok binaan paling sedikit adalah Kecamatan Sitahuis yaitu 34 anggota dengan kelompok binaan sebanyak 2 kelompok. Rata-rata per kelompok adalah 17 orang.

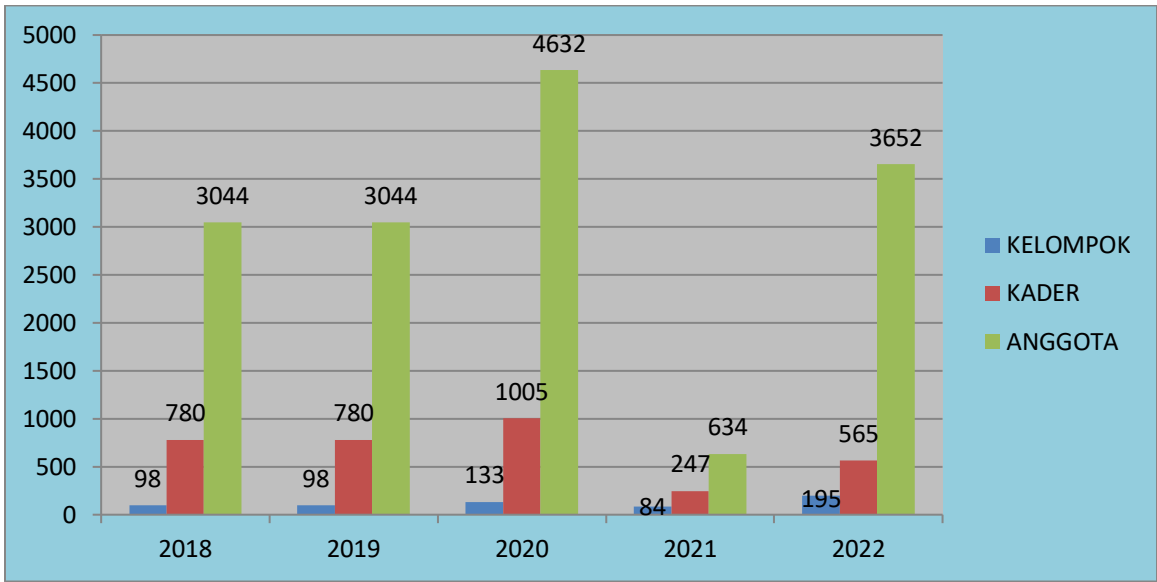
5.3.4.2 Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)

Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10 – 24 tahun. Selain itu BKR juga sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan tukar pengalaman serta pemikiran antara keluarga yang sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga bisa memberikan pandangan untuk memecahkan masalah secara bersama. Dengan adanya pengembangan kelompok BKR ini juga bisa membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja.

Bentuk kegiatan yang dilakukan BKR adalah dengan mengumpulkan para orangtua yang mempunyai anak remaja. Biasanya kegiatan ini dilakukan selama sebulan sekali untuk diberikan pendidikan, pelatihan dan pengetahuan seputar permasalahan dan cara mengatasi permasalahan remaja. Di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)

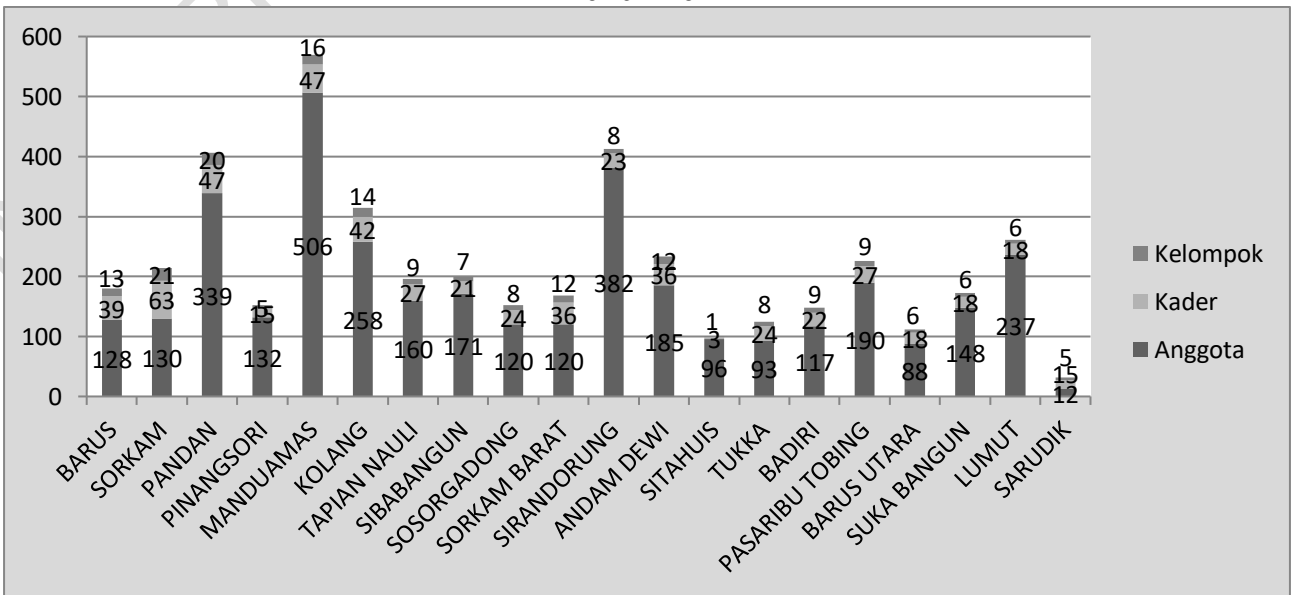
dari tahun 2018 sampai akhir tahun 2022 sebanyak 133 kelompok. Adapun perkembangan dari kelompok Kegiatan BKR ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 5.17
Perkembangan Bina Keluarga Remaja (BKR)
Di Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2018 s/d 2022



Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat perkembangan kelompok BKR dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018 hanya terdapat 98 kelompok BKR, Kader yang membina sebanyak 780 kader dan anggota yang dibina sebanyak 3044 anggota. Dan sampai kepada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu menjadi 195 kelompok, dengan 565 kader yang membina dan 3652 anggota yang sudah dibina. Peningkatan ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat khususnya orangtua dan remaja yang tertarik akan manfaat yang didapatkan melalui kegiatan-kegiatan di kelompok BKR.

Gambar 5.18
Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)
Kab. Tapanuli Tengah
Tahun 2022



Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah terbentuk kelompok BKR. Anggota kelompok terbanyak di Kecamatan Manduamas yaitu 506 orang, 47 kader dengan 16 kelompok. Rata-rata anggota dalam setiap kelompok sebanyak 31 orang. Sedangkan jumlah anggota kelompok binaan paling sedikit adalah Kecamatan Sarudik yaitu 12 anggota dengan kelompok binaan sebanyak 5 kelompok. Rata-rata per kelompok adalah 2 orang.

5.3.4.3 Bina Keluarga Lansia atau BKL

Bina Keluarga Lansia atau BKL merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia. Pengetahuan ini meliputi pola perawatan, pengasuhan, dan pemberdayaan kaum lansia agar kesejahteraannya bisa meningkat.

BKL mempunyai dua sasaran, yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsungnya adalah keluarga yang mempunyai lansia atau keluarga yang semua anggotanya merupakan kaum lansia. Sedangkan sasaran tidak langsungnya, yang pertama adalah perorangan seperti guru, ulama atau pemuka agama, tokoh adat, pemuda, pemimpin organisasi dan para ahli yang memiliki ketrampilan di bidang psikolog, perawatan, kebidanan, dan dokter. Kemudian, yang kedua adalah lembaga pemerintah maupun swasta, seperti sekolah, organisasi perempuan, dan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pembinaan Fisik dan Psikis

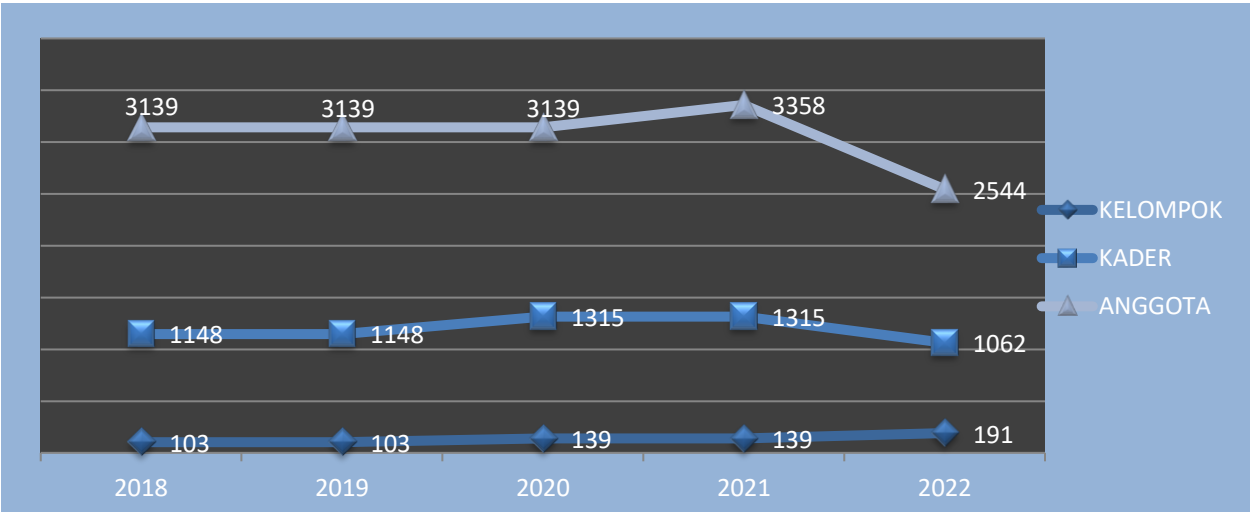
Yang dimaksud dengan pembinaan fisik untuk lansia adalah pembinaan bagi kaum lansia sesuai dengan kondisi fisik dan usia mereka, misalnya melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, atau sekadar menikmati makan bersama.

Selain fisik, kaum lansia juga sering mengalami masalah psikis, misalnya cemas dan takut menghadapi kemunduran fisik di tubuhnya, takut sakit, takut kehilangan pergaulan atau takut tersingkir secara sosial dari lingkungannya. Melalui program Bina Keluarga Lansia, diharapkan ketakutan tersebut bisa dihilangkan.

Di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) dari tahun 2018 sampai akhir tahun 2022 sebanyak 191 kelompok. Adapun perkembangan dari kelompok

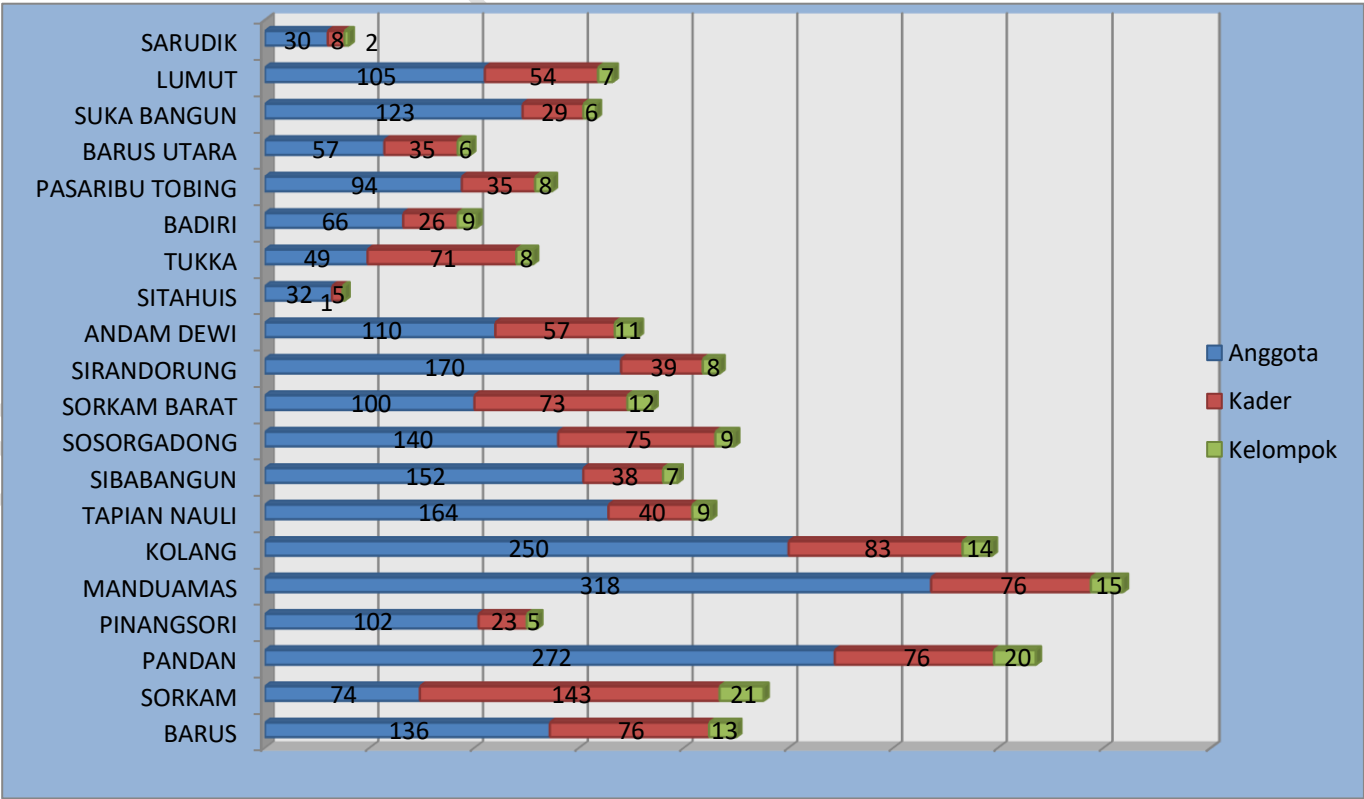
Kegiatan BKL ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 5.19
Perkembangan Bina Kelompok Lansia (BKL) di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018 s/d 2022



Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat perkembangan kelompok BKL dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018 hanya terdapat 103 kelompok BKL, Kader yang membina sebanyak 1148 kader dan anggota yang dibina sebanyak 3.139 anggota. Dan sampai kepada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu menjadi 191 kelompok, dengan 1062 kader dan 2544 anggota yang sudah dibina. Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bina Kelompok Lansia seiring dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Gambar 5.20
Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022



Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah terbentuk kelompok BKL. Anggota kelompok terbanyak di Kecamatan Manduamas yaitu 318 orang, 76 kader dengan 15 kelompok. Rata-rata anggota dalam setiap kelompok sebanyak 21 orang. Sedangkan jumlah anggota kelompok binaan paling sedikit adalah Kecamatan Sarudik yaitu masing 30 anggota dengan kelompok binaan sebanyak 2 kelompok. Rata-rata per kelompok adalah 15 orang.

5.3.5 Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

UPPKA itu sendiri adalah sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan keluarga Sejahtera II plus, baik yang sudah menjadi akseptor KB serta anggota masyarakat yang berminat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, aktif melakukan usaha bersama dalam usaha ekonomis produktif.

Jumlah kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sampai akhir tahun 2022 sebanyak 51 kelompok.

Nama-nama UPPKA sebagai berikut:

- | | | | |
|----|----------------|----|------------------|
| 1 | SEROJA | 23 | MAWAR |
| 2 | SATAHI | 24 | SUKA MAJU |
| 3 | MAWAR | 25 | MAJU JAYA |
| 4 | ANGGREK | 26 | MAJU MAJU |
| 5 | SEPAKAT | 27 | SAROHA |
| 6 | NYIUR MELAMBAI | 28 | PERMATA |
| 7 | LATULIP | 29 | SUMBER REZEKI |
| 8 | CENDRAWASIH | 30 | SEKAR MAJU |
| 9 | BERKAH | 31 | UPPKS SIDALING |
| 10 | SAKURA | 32 | UPPKS SIMARGARAP |
| 11 | SEHATI | 33 | UPPKS MAKMUR |
| 12 | HARAPAN BARU | | UPPKAS SUGA-SUGA |
| 13 | DOS ROHA | 34 | HUAGODANG |
| 14 | BERSAMA | 35 | MAWAR |
| 15 | SUMBER HIDUP | 36 | SAHABAT |
| 16 | MAWAR | 37 | BINTANG |
| 17 | UNYIL | 38 | SAHABAT |
| 18 | MUJUR | 39 | Bersama |
| 19 | MARSADA | 40 | MELATI |
| 20 | BAYAM | 41 | MAWAR |
| 21 | TERATAI | 42 | MAKANAN SEHAT |
| 22 | MELATI | | |

5.3.6 Kampung KB

KB yang berjumlah 38 Kampung KB yang tersebar di 20 Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6
Data Kampung KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2022

NO	NAMA KAMPUNG KB	KECAMATAN
1	KAMPUNG KB KELURAHAN HAJORAN	KECAMATAN PANDAN
2	KAMPUNG KB DESA MANDUAMAS LAMA	KECAMATAN MANDUAMAS
3	KAMPUNG KB KELURAHAN BAJAMAS	KECAMATAN SIRANDORUNG
4	KAMPUNG KB DESA SITIRISTIRIS	KECAMATAN ANDAM DEWI
5	KAMPUNG KB DESA SIHARBANGAN	KECAMATAN BARUS UTARA
6	KAMPUNG KB DESA BUKIT BATUPANGAN	KECAMATAN BARUS
7	KAMPUNG KB KELURAHAN SOSORGADONG	KECAMATAN SOSORGADONG
8	KAMPUNG KB DESA AEK RASO	KECAMATAN SORKAM BARAT
9	KAMPUNG KB KELURAHAN TARUTUNG BOLAK	KECAMATAN SORKAM
10	KAMPUNG KB DESA SUGASUGA HUTAGODANG	KECAMATAN PASARIBU TOBING
11	KAMPUNG KB DESA UNTE MUNGKUR I	KECAMATAN KOLANG
12	KAMPUNG KB MELA I	KECAMATAN TAPIAN NAULI
13	KAMPUNG KB DESA BONAN DOLOK	KECAMATAN SITAHUIS
14	KAMPUNG KB KELURAHAN PASIR BIDANG	KECAMATAN SARUDIK

15	KAMPUNG KB KELURAHAN BUDI LUHUR	KECAMATAN PANDAN
16	KAMPUNG KB KELURAHAN BONALUMBAN	KECAMATAN TUKKA
17	KAMPUNG KB DESA KEBUN PISANG	KECAMATAN BADIRI
18	KAMPUNG KB DESA PARJALIHOTAN BARU	KECAMATAN PINANGSORI
19	KAMPUNG KB DESA AEK GAMBIR	KECAMATAN LUMUT
20	KAMPUNG KB KELURAHAN SIBABANGUN	KECAMATAN SIBABANGUN
21	KAMPUNG KB DESA PULO PAKKAT 1	KECAMATAN SUKABANGUN
22	KAMPUNG KB DESA MELA DOLOK	KECAMATAN TAPIAN NAULI
23	KAMPUNG KB DESA SOGAR	KECAMATAN ANDAM DEWI
24	KAMPUNG KB DESA PO SIMARGARAP	KECAMATAN PASARIBU TOBING
25	KAMPUNG KB DESA SIHADATUON	KECAMATAN SUKABANGUN
26	KAMPUNG KB DESA TUMBA NAULI	KECAMATAN MANDUAMAS
27	KAMPUNG KB DESA SIHAPAS	KECAMATAN SUKABANGUN
28	KAMPUNG KB DESA MUARA NAULI	KECAMATAN SORKAM
29	KAMPUNG KB DESA HUDOPA NAULI	KECAMATAN KOLANG
30	KAMPUNG KB DESA PAGARAN BARU	KECAMATAN MANDUAMAS
31	KAMPUNG KB DESA SIMANOSOR	KECAMATAN SIBABANGUN
32	KAMPUNG KB DESA TOGA BASIR	KECAMATAN PINANGSORI

33	KAMPUNG KB DESA PAGARAN HONAS	KECAMATAN BADIRI
34	KAMPUNG KB DESA SIDALING	KECAMATAN PASARIBU TOBING
35	KAMPUNG KB DESA MUARA SIBUNTUON	KECAMATAN SIBABANGUN
36	KAMPUNG KB DESA PULO PAKKAT	KECAMATAN SUKABANGUN
37	KAMPUNG KB DESA BARINGIN	KECAMATAN SOSORGADONG
38	KAMPUNG KB DESA MAKMUR	KECAMATAN PASARIBU TOBING

Kegiatan ini terbagi dalam beberapa sub kegiatan yaitu:

- Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB
- Pertemuan Lokakarya mini desa dan kecamatan di kampung KB,
- Operasional Orientasi kader di kampung KB percontohan
- Pertemuan operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (POKTAN) dan
- Operasional Kegiatan Penanganan Stunting dalam rangka Penurunan angka Stunting

Kelompok Sasaran Kegiatan adalah Kelompok Remaja, Calon Pengantin, Ibu hamil, Ibu yang mempunyai anak dua Tahun kebawah (Baduta), Balita. Daftar Desa Lokus Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 yaitu:

1. Desa Sitiris-Tiris Kecamatan Andam Dewi
2. Desa Lobu Tua Kecamatan Andam Dewi
3. Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badiri
4. Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri
5. Desa Ujung Batu Kecamatan Barus
6. Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus
7. Desa Pasar Terandam Kecamatan Barus
8. Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan Barus
9. Desa Aek Dakka Kecamatan Barus
10. Desa Sihorbo Kecamatan Barus Utara
11. Desa Purba Tua Kecamatan Barus Utara
12. Desa Parik Sinomba Kecamatan Barus Utara

13. Desa Hurlang Muara Nauli Kecamatan Kolang
14. Desa Unte Mungkur III Kecamatan Kolang
15. Desa Hudopa Nauli Kecamatan Kolang
16. Desa Satahi Nauli Kecamatan Kolang
17. Kelurahan Kolang Nauli Kecamatan Kolang
18. Desa Pargaringan Kecamatan Kolang
19. Desa Sipakpahi Aek Lobu Kecamatan Kolang
20. Desa Unte Mungkur II Kecamatan Kolang
21. Desa Unte Mungkur I Kecamatan Kolang
22. Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut
23. Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut
24. Kelurahan Binjohara Kecamatan Manduamas
25. Desa Suga-Suga Kecamatan Pasaributobing
26. Desa Suka Maju Kecamatan Pasaributobing
27. Desa Danau Pandan Kecamatan Pinangsori
28. Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik
29. Desa Sigodung Kecamatan Sirandorung
30. Desa Naga Timbul Kecamatan Sitahuis
31. Kelurahan Pargarutan Kecamatan Sorkam
32. Desa Teluk Roban Kecamatan Sorkam
33. Desa Rianiate Kecamatan Sorkam
34. Desa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam
35. Desa Muara Nauli Kecamatan Sorkam
36. Desa Botot Kecamatan Sorkam
37. Desa Pagaran Julu Kecamatan Sorkam
38. Kelurahan Nai Pospos Barat Kecamatan Sorkam
39. Desa Sihapas Kecamatan Sorkam
40. Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat
41. Desa Siantar Ca Kecamatan Sosorgadong
42. Kelurahan Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong
43. Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong
44. Desa Muara Bolak Kecamatan Sosorgadong
45. Desa Unte Boang Kecamatan Sosorgadong
46. Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong
47. Desa Sihapas Kecamatan Sukabangun
48. Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka
49. Desa Tampilan Nauli Saurmanggita Kecamatan Tukka

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya penurunan Stunting pada tahun 2022 yaitu Kegiatan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK pada ibu hamil dan ibu yang mempunyai Anak Baduta dan Kegiatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stunting bagi Calon Pengantin.

5.3.7 Generasi Berencana

Generasi Berencana (GenRe) adalah remaja dan pemuda yang memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku sebagai remaja, namun penuh dengan perencanaan matang dalam menapaki masa depan. Perencanaan itu adalah sbb:

- a. Usia Kawin Pertama 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.
- b. Usia yang baik untuk hamil anak pertama 20-30 tahun.
- c. Usia maksimal yang aman untuk hami 135 tahun.
- d. Jumlah Ideal untuk memiliki anak: 2 lebih baik.
- e. Jarak kelahiran anak pertama dan kedua: 3 tahun
- f. Perilaku hidup sehat dan berakhlak mulia.
- g. Yang harus dipersiapkan : Melanjutkan Sekolah, mencari Pekerjaan, Menyiapkan diri untuk berkeluarga, Menjadi anggota masyarakat, mempraktikkan hidup yang sehat.

Dilakukan pembinaan kepada Remaja di kelompok Remaja melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), untuk memudahkan penyampaian pesan yang harus diketahui oleh Remaja untuk mencegah pernikahan dini, kematian ibu dan bayi akibat ketidaksiapan ibu hamil/ melahirkan dan menjadi Keluarga yang Berencana.

5.3.8 Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau yang lebih dikenal dengan PIK-R adalah suatu wadah kegiatan PKBR (Pusat Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. PIK Remaja sendiri merupakan bagian dari PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) yang kemudian oleh BKKBN dibagi menjadi dua yaitu: Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) dan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK Mahasiswa)

Adapun Tujuan umum dari PIK Remaja adalah memberikan informasi PKBR, Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan konseling dan rujukan PKBR. Disamping itu, juga dikembangkan kegiatan-kegiatan lain yang khas dan sesuai minat dan kebutuhan remaja untuk mencapai Tegar Remaja dalam rangka tegar Keluarga guna mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

Jumlah kelompok PIK-R/M sampai akhir tahun 2022 sebanyak 67 kelompok. Nama-nama PIK-R/M sebagai berikut :

- | | | | |
|----|-------------------------|----|---------------------|
| 1 | CENDRAWASIH | 22 | MAWAR |
| 2 | REMAJA BERAKSI | 23 | MELATI |
| 3 | BINA WARGA | 24 | MAWAR |
| 4 | SEHAT | 25 | SAROHA |
| 5 | PANTAI NAULI | 26 | KENANGAN |
| 6 | CENDRAWASIH | 27 | MEKAR |
| 7 | JAMBU ASRI | 28 | ANGREK |
| 8 | SEPAKAT | 29 | MELATI |
| 9 | MELATI | 30 | SEJORA |
| 10 | MAWAR | 31 | LAVENDER |
| 11 | REFLESIA | 32 | RAFLESIA |
| 12 | SETIA | 33 | RAMOS |
| 13 | SEHAT | 34 | NAPOSO NAULI BULUNG |
| 14 | MAN PANDAN | 35 | REMAJA MAHASISWA |
| 15 | RM PANDAN WANGI | 36 | ANGREK |
| 16 | SMA NEGERI 1 PINANGSORI | 37 | DOSTAHI NAULI |
| | MUDA-MUDI PARJALIHOTAN | 38 | MARSADA |
| 17 | BARU | 39 | MARSADA |
| 18 | MUDA-MUDI TOGA BASIR | 40 | MELATI |
| 19 | MAWAR | 41 | MAWAR |
| 20 | NUSA INDAH | 42 | CEMARA BAJAMAS |
| 21 | ASOKA | | |

43	PIK R LAE BINGKE	56	SETIA
44	LENGKUAS SAMPANG MARUHUR	57	SIPAKPAHI
45	Semangat	58	REMAJA HUTAGINJANG
46	CERIA	59	REMAJA DAHLIA
47	ROSE	60	REMAJA MELATI
48	FLAMBOYAN	61	REMAJA GEREJA
49	SMK NEGERI 1 BADIRI	62	Remaja Mesjid
50	GENERASI MAJU	63	Bakti Mulia Sibuluan Nalambok
51	BAHAGIA	64	Mawar
52	SMAN 1 Pasaribu Tobing	65	Karang Taruna
53	PMSH	66	Bakti Mulia
54	PO.NSPB	67	Kamboja
55	SI CANTIK		

5.3.9 Dampak Program KB Terhadap Aspek Demografi

Keberhasilan Program KB di suatu wilayah dapat diukur dari kondisi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), TFR, dan CBR.

Tabel 5.7
Dampak Program KB Terhadap Aspek Demografi Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun 2018 –2022

NO	TAHUN	Pertumbuhan Penduduk (Persen)
1	2018	1.78
2	2019	1.75
3	2020	1.56
4	2021	1.51
5	2022	1.97

Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.Pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan oleh penambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi).

Pada tabel dibawah ini, diketahui bahwa terjadi penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dari tahun 2018 yaitu 1,78% sampai dengan tahun 2021 yaitu 1,51%. Dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 1,97%. Penurunan ini menunjukan keberhasilan Program KB di Kabupaten Tapanuli Tengah. Disebabkan berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak peran serta masyarakat dalam program KB. Laju pertumbuhan penduduk apabila tidak dikendalikan berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk.

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

1. Analisis data dilakukan dengan menentukan indikator output dan outcome yang tidak sesuai dengan harapan melalui penelusuran indikator input proses yang mungkin mempengaruhinya. Alur analisa ini akan memudahkan pengelola program untuk melihat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap capaian output ataupun outcome.
2. Analisis harus dilakukan disetiap level dari nasional, provinsi, kabupaten dan kecamatan. Analisis yang dilakukan akan membantu pengelola program dalam menentukan langkah perbaikan kedepannya sehingga indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai.

6.2 SARAN

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas data. Semakin tinggi cakupan laporan dan kualitas data yang dikumpulkan, maka akan semakin dapat memberikan gambaran capaian program KB di setiap bidangnya pada periode waktu tertentu. Untuk itu, pemantauan kualitas data juga perlu dilakukan dari level pengisian data, rekap dan pengolahan data.
2. Melakukan mekanisme umpan balik terkait hasil analisis data kepada pengelola program untuk rencana perbaikan program ke depan.
3. Sosialisasi cara memanfaatkan data dan melakukan analisis teknis terhadap capaian program KB kepada seluruh pengelola program KB khususnya kepada pengelola data di tingkat Kecamatan.

Pandan, Juni 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULIN TENGAH

FREDDY L. SITUMEANG, S.Sos, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640223 198803 1 003

